



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO 74 TAHUN 2016 TENTANG NAGARI MADANI DI NAGARI LAWANG KEC. MATUR KAB. AGAM MENURUT FIQH SIYASAH

## SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum  
(SH)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh

**SYUKRIADI**  
NIM. 11720415220

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**PEKANBARU**  
**1443 H/2021 M**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul Implementasi Peraturan Bupati No 74 tahun 2016  
Tentang Nagari Madani di Nagari Lawang Kec. Matur Kab. Agam Menurut Fiqh  
Siyasah, yang ditulis oleh:

Nama : Syukriadi  
Nim : 11720415220  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah  
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Agustus 2021

Pembimbing Skripsi

**Dr. ARISMAN M. Sy**  
NIP.198409292020121001

UIN SUSKA RIAU



## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO. 74 TAHUN 2016 TENTANG NAGARI MADANI DI NAGARI LAWANG KEC. MATUR KAB. AGAM MENURUT FIQH SIYASAH" Yang ditulis oleh :

: **SYUKRIADI**  
: 11720415220  
: Hukum Tata Negara Siyasa

Telah di Munaqasyahkan Pada :

: Senin/ 11 Oktober 2021  
: Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum  
: 13.00 WIB

Telah diperbaiki sesuai permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Oktober 2021

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Rahman Alwi, M.Ag**

Sekretaris  
**Dr. H. Zul Ikromi, Lc., M.Sy**

Penguji I  
**Mohammad Abdi Almaktsur, MA**

Penguji II  
**Kamiruddin, M.Ag**

Mengetahui

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NID. 197410062005011005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Tempiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021  
Tangal : 10 September 2021

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: SYUKRIADI  
: 11720415220  
: LAHAR : LAWANG / 28 SEPTEMBER 1998  
: SYARIAH DAN HUKUM  
: HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Implementasi Peraturan Bupati No. 74 Tahun 2016  
Tentang Nagari Madani di Nagari Lawang, kec. Matur  
Kab. Agam Menurut fiqh Siyasah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :  
Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut  
di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan  
bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan  
Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya ) \*saya tersebut, maka saya bersedia menerima  
sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari  
pihak manapun juga.

Pekanbaru, 01 Nov 2021  
Yang membuat pernyataan



SYUKRIADI  
NIM : 11720415220

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Dilarang mengutip, menyalin, atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumbernya.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Syukriadi (2021) : Implementasi Perbup No 74 tahun 2016 Tentang Nagari Madani di Nagari Lawang Kec. Matur Kab. Agam Menurut Fiqh Siyasah.**

Adapun dalam penelitian ini dilatarbelakangi masalah dari terbitnya Perbup No. 74 Tahun 2016 Tentang Nagari Madani, yang mana pelaksanaan Perbup ini di Nagari Lawang belum maksimal dalam hal aplikasi di lapangan. Peraturan tinggal peraturan, kurangnya keseriusan seluruh elemen masyarakat tentunya sasaran yang diinginkan untuk mewujudkan Nagari Madani di Nagari Lawang akan sulit untuk terlaksana.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yakni pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Nagari Madani di Nagari Lawang Kec. Matur Kab. Agam, faktor yang mempengaruhi penerapan dan tinjauan Fiqh Siyasah dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini di Nagari Lawang.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi dan wawancara. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Kemudian dalam populasi dan sampel secara keseluruhan adalah sumber data yang dikumpulkan untuk bahan penelitian. Melalui wawancara dan observasi dilapangan penulis memperoleh hasil setelah mengetahui permasalahan yang ada, maka penulis meninjau dengan pandangan Fiqh Siyasah dengan menampilkan nash Al-Qur'an, hadist, dan kaedah fiqhiyah untuk mempertegas kesimpulan yang ditarik.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Nagari Madani di Nagari Lawang Kec. Matur Kab. Agam, penulis berkesimpulan bahwa Perbup ini belum maksimal, hal ini disebabkan karena kurangnya keseriusan seluruh elemen dalam hal implentasi di Lapangan. Hal ini menjadi faktor penghambat terwujudnya Nagari Madani, sehingga faktor pendukung yang ada tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini jika ditinjau dari Fiqh Siyasah bahwa kebijakan pelaksanaan Nagari Madani ini merupakan langkah untuk merespon bagaimana semestinya kehidupan zaman Nabi SAW dahulu dapat diterapkan pada zaman sekarang sesuai perkembangan yang ada. Selain itu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, juga merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial rakyatnya demi kemasalahatan umat. Akan tetapi yang terjadi dilapangan dalam hal penerapan masih jauh dari apa yang diharapkan.

**Kata Kunci : Nagari Madani dan Fiqh Siyasah**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, dengan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sehingga dapat dipersembahkan kepada pembaca yang budiman dan pembaca yang cinta akan ilmu pengetahuan.

Atas berkat rahmat Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Perbup No 74 Tahun 2016 Tentang Nagari Madani di Nagari Lawang Kec. Matur Kab. Agam ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Siyasah”. Shalawat dan salam kehadiran junjungan alam, Baginda Nabi Muhammad Saw. yang mana berkat perjuangan beliau Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia hingga kita umatnya bisa merasakan indahnya Islam.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya penulis banyak menemukan kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana serta ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Tanpa bantuan dan motivasi dari semua pihak, skripsi ini tidak akan selesai sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ayahanda (Masrizal), Ibunda (Nurbaiti) serta Kakak-kakak penulis (Zuryanti, Ratmaini, Serli Yunika Putri dan Wahyudi) yang telah memberikan dukungan materil maupun moril kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sekaligus studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Pelaksana Tugas (Plt) Rektor UIN Suska Riau dan seluruh civitas akademika UIN Suska Riau. Wakil Rektor I Dr.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Edi Erwan, S.Pt.,M.Sc.,Ph.D.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.
4. Bapak Rahman Alwi, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) serta seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmu dan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
5. Bapak Arisman, M.Sy selaku pembimbing dan Penasehat Akademis yang telah memberikan ilmu, arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini serta memberikan saran-saran dan motivasi kepada penulis selama kuliah di UIN Suska Riau.
6. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya keluarga Hukum Tata Negara (Siyasah) angkatan 2017 yang telah banyak membantu dan memberikan saran kepada penulis selama belajar mengajar di bangku perkuliahan.
7. Teruntuk sahabat terbaik penulis Arzicha Putty Annisa yang telah banyak membantu dan memberikan semangat (*Support System*) dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teruntuk Saudara yang sudah seperti saudara kandung ( Adek Joko Hariyanto dan Sri Hamid ) yang telah membersamai penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Untuk semua keluarga, sahabat, teman, dan orang-orang spesial dalam hidup penulis yang memberikan motivasi dan semangat, yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih atas semuanya. Hanya Allah Swt. yang bisa membalas seluruh kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun teknik penulisan sebuah karya ilmiah. Untuk itu saran dan kritikan yang membangun diharapkan untuk kesempurnaan penulisan skripsi di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. *Amiin ya Robbal 'Alamin.*

Pekanbaru, 18 Agustus 2021  
Penulis

**Syukriadi**  
**NIM. 11720415220**

UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Hal yang dimaksud dengan transliterasi adalah alih aksara dari tulisan asing (terutama Arab) ke dalam tulisan Latin dimana istilah Arab tersebut belum dapat diakui sebagai kata bahasa Indonesia atau lingkup penggunaannya masih terbatas.

Berikut adalah daftar aksara Arab dan padanannya dalam aksara latin:

Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
ا		tidak dilambangkan
ب	b	be
ت	t	te
ث	ts	te dan es
ج	j	je
ح	<u>h</u>	ha dengan garis bawah
خ	<u>kh</u>	ka dan ha
د	d	de
ذ	dz	de dan zet
ر	r	er
ز	z	zet
س	s	es
ش	sy	es dan ye
ص	<u>s</u>	es dengan garis bawah
ض	<u>d</u>	de dengan garis bawah
ط	t	te dengan garis bawah
ظ	<u>z</u>	zet dengan garis bawah
ع	,	koma terbalik di atas hadap kanan
غ	gh	ge dan ha
ف	f	ef
ق	q	qo
ك	k	ka

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ل	l	el
م	m	em
ن	n	en
و	w	we
ه	h	ha
ء	,	apostrop
ي	y	ya

Dalam bahasa Arab, vokal sama seperti bahasa Indonesia, memiliki vokal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*. Untuk vokal tunggal atau *monoftong*, ketentuan alih aksaranya sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ا	a	<i>fathah</i>
ي	i	<i>kasrah</i>
و	u	<i>dammah</i>

Sementara itu, untuk vokal rangkap atau *diftong*, ketentuan sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اي	ai	a dan i
او	au	a dan u

Ketentuan alih aksara vokal panjang (*madd*), yang dalam bahasa Arab diimbangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
آ	â	a dengan topi di atas
إي	î	i dengan topi di atas
ؤ	û	u dengan topi di atas





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata sandang, dalam bahasa Arab dilambangkan dengan alif dan lam, dialihaksarakan menjadi huruf “l” (el), baik diikuti huruf *syamsiyyah* atau huruf *qamariyyah*. Misalnya:

الاجتهاد = *al-ijthad*

الرخصة = *al-rukhsah*, bukan *ar-rukhsah*

Dalam alih aksara, *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggunakan huruf yang diberi tanda *syaddah*. Tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syaddah*. Tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syaddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyyah*. Misalnya:

اشفعة = *al-syuf’ah* tidak ditulis *asy-syuf’ah*

Dalam penulisan *ta marbutah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri (lihat contoh 1) atau diikuti oleh kata sifat (*na’t*) (lihat contoh 2), maka huruf *ta marbutah* tersebut dialihaksarakan menjadi huruf “h” (ha). Jika huruf *ta marbutah* tersebut diikuti dengan kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf “t” (te) (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	شريعة	<i>syarî’ah</i>
2	الشريعة الإسلامية	<i>al-syarî’ah al-islâmiyyah</i>
3	مقارنة المذاهب	<i>muqâranat al-madzâhib</i>

Untuk huruf kapital tidak dikenal dalam tulisan Arab. Tetapi dalam transliterasi huruf ini tetap digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Perlu diketahui bahwa jika nama diri diawali oleh kata sandang, maka huruf yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh: البخاري = *Abu-Bukhari* tidak ditulis *Al-Bukhari*.

Beberapa ketentuan lain dalam EYD juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring atau cetak tebal. Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama yang berasal dari dunia



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meski akar kata nama tersebut berasal dari bahasa Arab. Misalnya: Nuruddin al-Raniri, tidak ditulis Nur al-Din al-Raniri.

Setiap kata, baik kata kerja (fi'il) kata benda (ism) atau huruf (harf), ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas:

No	Kata Arab	Alih Aksara
1	الضرورة تبیح المحظورات	al- <u>dar</u> ûrah tubî <u>hu</u> al- mah <u>z</u> ûrât
2	الاقتصاد الاسلامي	al-iqtisâd al-islâmî
3	أصول الفقه	u <u>s</u> ûl al-fiqh
4	الأصل في الأشياء الإباحة	al-‘a <u>s</u> l fî al-asyya al- ibâ <u>h</u> ah
5	المصلحة المرسلة	al-ma <u>s</u> lahah al- mursalah



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRASNLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
 <b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Penulisan.....	14
 <b>BAB II     GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Nagari Lawang .....	23
B. Landasan Terbentuknya Nagari Lawang.....	25
C. Kondisi Geografis Nagari Lawang .....	26
D. Visi Dan Misi Nagari Lawang.....	28
E. Jumlah Pegawai .....	29
F. Jumlah Penduduk.....	29
G. Kondisi Pendidikan .....	34
H. Kondisi Keagamaan.....	36
 <b>BAB III    KONSEP TEORITIS</b>	
A. Teori Fiqh Siyasah.....	38
1. Pengertian Fiqh Siyasah .....	38
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah .....	40
3. Objek Kajian Fiqh Siyasah .....	42
B. Gambaran Umum Nagari Madani .....	44





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengertian Nagari Madani.....	44
2. Maksud Dan Tujuan Nagari Madani .....	46
3. Peran Dan Fungsi Nagari Madani .....	47
4. Pengertian Implementasi .....	48
5. Visi Dan Misi Nagari Madani .....	50
C. Konsep Madani Zaman Nabi dan Modern .....	53
1. Konsep Madani Zaman Nabi .....	53
2. Konsep Madani Zaman Modern .....	53
D. Konsep Madani Dalam Peraturan Bupati No 74 Tahun 2016..	57
1. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Bupati No 74 Tahun 2016 .	57
2. Prinsip-prinsip Masyarakat Madani .....	59
3. Madani Dalam Peraturan Bupati No 74 Tahun 2016 .....	60
4. Struktur dan Isi Perbup No 74 Tahun 2016.....	62

**BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Pelaksanaan Perbup No. 74 Tahun 2016 Tentang Nagari Madani di Nagari Lawang .....	64
B. Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Nagari Madani di Nagari Lawang .....	69
C. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Perbup No. 74 Tahun 2016 Tentang Nagari Madani di Nagari Lawang.....	77

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	89
B. Saran .....	91

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

**LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

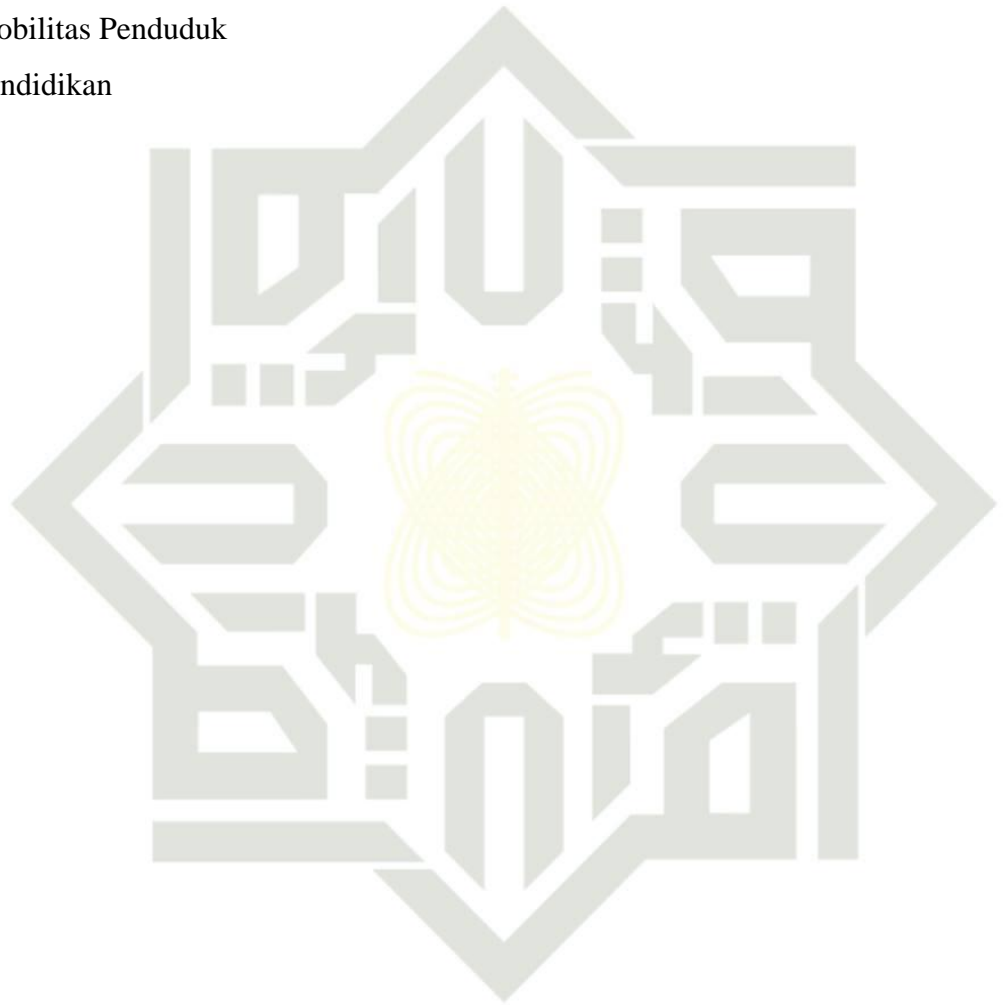


#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel I	: Batas Wilayah
Tabel II	: Topografi / Bentang Lahan
Tabel III	: Jumlah Kepala Keluarga (KK)
Tabel IV	: Kepadatan Penduduk
Tabel V	: Mobilitas Penduduk
Tabel VI	: Pendidikan



UIN SUSKA RIAU



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang Masalah

Reformasi Desentralisasi yang dimulai pada tahun 2001 merupakan wujud dari komitmen Indonesia menuju pemerintahan daerah yang demokratis dan pembangunan berkelanjutan. Dikeluarkannya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menjadi penanda terbukanya kesempatan luas bagi usaha pembangunan daerah dan bagi partisipasi warga yang lebih besar dalam pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah sistem Pemerintahan di daerah dengan penguatan sistem desentralisasi (Otonomi Daerah). Perubahan tersebut merupakan implementasi dari Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa: “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.<sup>1</sup> Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah menyelenggarakan semua urusan rumah tangga pemerintahan daerahnya di luar urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan pusat. Hal ini tercermin di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) undang-undang tersebut, yang terdiri atas 6 (enam) urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah

<sup>1</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 01.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pusat, yaitu: agama, moneter dan fiskal nasional, keamanan, pertahanan, politik luar negeri, yustisi. Di luar ke enam urusan tersebut menjadi urusan masing-masing daerah.<sup>2</sup>

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan dalam bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan pembentukan Perda merupakan salah satu wujud kemandirian daerah dalam mengatur urusan rumah tangga daerah atau urusan pemerintahan daerah. Perda merupakan instrumen yang strategis sebagai sarana mencapai tujuan desentralisasi. Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan Perda pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara maksimal.<sup>3</sup>

Selain itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, bahwa tugas dan wewenang DPRD antara lain:

- a. Membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
- b. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain, Keputusan Gubernur, Bupati dan

<sup>2</sup> Pasal 10 ayat (3) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004.

<sup>3</sup> Reny Rawasita, et.al., *Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah*, (Jakarta Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia PSHK), 2009, hlm 60.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Walikota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Kerjasama Internasional di daerah.

Dalam ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi Urusan wajib kewenangan pemerintah daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Untuk menjalankan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Daerah memerlukan perangkat Peraturan Perundang-undangan. Sesuai dengan batasan pengertiannya menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip NKRI.<sup>4</sup> Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah berada pada Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi

---

<sup>4</sup> Siswanto Sunarno, *OpCit*, hlm. 05.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan tugas pembantuan.”<sup>5</sup> Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk wilayah kabupaten, salah satu pemerintah kabupaten di Indonesia yaitu Kabupaten Agam membuat wewenang berkaitan dengan Agama dan Politik islam yang dianggap menjadi urusan masing-masing daerah. Wewenang tersebut tertulis dalam Peraturan Bupati Kabupaten Agam. Peraturan Bupati Adalah adalah peraturan yang dikeluarkan oleh bupati atas wewenangya dalam daerah otonom terkait suatu hal demi kepentingan masyarakat dan secara tertulis.

Salah satu bentuk peraturan Bupati yang di keluarkan salah satu pemerintah Kabupaten Agam yaitu Peraturan Bupati No 74 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Nagari Madani. Dalam Peraturan Bupati ini sejalan dengan kelima si Pancasila, yakni :

1. Ketuhanan yang maha esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 02.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Kabupaten Agam dalam mengusulkan Nagari Madani tentunya ada tujuan, adapun tujuan penerapan Gerakan Nagari Madani adalah upaya untuk lebih menggairahkan semangat "*Baliak ka Surau*". Secara fisik atau zahir, masjid diramaikan, dan secara substantif adalah bagaimana menghidupkan kembali pendidikan surau, yang memuat olah hati, rasa, fikir, dan raga. Hal itu ditandai dengan pengucapan ikrar dan launching Gerakan Nagari Madani oleh Bupati Agam Indra Catri Dt Malako Nan Putih, serta dikeluarkannya ketetapan Pemerintah kabupaten Agam berupa UU No 74 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Nagari Madani di Kabupaten Agam.

Pemerintah Kabupaten Agam berkomitmen mewujudkan kehidupan beragama, dan beradat di 82 Nagari di 16 Kecamatan, maka dari itu Pemerintah Kabupaten Agam melakukan pembekalan atau pembinaan terhadap masing-masing pelopor Nagari Madani di setiap Nagari yang ada di kabupaten (tercantum dalam BAB V Pasal 11), hal ini sebagai bentuk awal dari pelaksanaan dari Perbup No 74 tahun 2016 dan nantinya dari pembekalan atau pembinaan yang diberikan masing-masing pelopor setiap nagari dapat mensosialisasikan di nagarinya masing-masing.

Menurut Perbup No 74 Tahun 2016 pasal 1 menyebutkan bahwa Nagari madani adalah Nagari yang religius atau alami yang berperadaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma- norma, hukum dan moral *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, syara' mangato adat mamakai*, masyarakat yang berlandaskan ukhuwah islamiyah,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghormati perbedaan, bersikap Demokratis dan terbuka ( Inklusif ), gotong royong dan kekeluargaan.<sup>6</sup>

Dalam BAB II Pasal 2 juga disebutkan manfaat dan tujuan Nagari Madani adalah untuk mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* (ABS SBK) guna mewujudkan karakter masyarakat yang madani.<sup>7</sup> Dalam pasal 3 dijelaskan Tujuan Nagari Madani adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pendidikan informal terutama Al-Qur'an ( baca, pahami, amalkan, hafal)
2. Peningkatan peranan Masjid/ surau sebagai sentral kehidupan sosial masyarakat.
3. Pelaksanaam perlindungan atas kampung dan masyarakat nagari.
4. Peningkatan rasa kepedulian sosial, ukhuwah islamiyah, kekeluargaan dan gotong royong.
5. Penerapan adat, seni budaya dan olahraga yang sesuai dengan filosofi *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* (ABS SBK)
6. Peningkatan peran serta lembaga dan organisasi masyarakat.
7. Peningkatan keshalehan individu dan sosial.<sup>8</sup>

Selanjutnya Pemerintah Daerah melakukan evaluasi Gerakan Nagari Madani setiap tahunnya, hal ini tertulis dalam Perbup no 74 tahun 2016 Pasal 7, yang mana evaluasi ini dilaksanakan oleh Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ( Pasal 9 ) dan untuk pembiayaan

<sup>6</sup> Perbup No 74 Tahun 2016

<sup>7</sup> Pasal 2 UU No 74 Th 2016

<sup>8</sup> Pasal 3 UU No 74 Th 2016

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaannya dibebankan kepada APBD kabupaten Agam, APBD Nagari, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Berdasarkan pengertian Nagari Madani, tujuan serta manfaatnya, jelas bahwa pendidikan islam (religi) dan masjid sebagai sentral kegiatan keagamaan, sosial, politik, ekonomi, bahkan seni dan budaya, sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Anis Matta menyatakan bahwa secara terminologi masyarakat madani adalah komunitas muslim pertama di kota Madinah yang dipimpin langsung oleh Rasulullah dan diikuti oleh Khalifah Ar-Rasyidin. Masyarakat madani yang dibangun pada masa Rasulullah SAW tersebut identik dengan *civil society*, karena secara sosio kultural mengandung substansi keadaban atau *civility*. Model masyarakat ini sering dijadikan sebuah model masyarakat modern, sebagaimana diakui oleh seorang sosiolog Robert N Bellah.<sup>9</sup>

Berawal dari adanya ketetapan tentang Nagari Madani ini, salah satu nagari di Kabupaten Agam yaitu Nagari Lawang ditunjuk sebagai nagari percontohan nagari madani di Kabupaten Agam, tentunya Pemerintah Nagari Lawang sebagai penggerak Nagari Madani di Nagari Lawang. Pemerintah Nagari Lawang dengan tokoh adat serta tokoh masyarakat menerima dan segera mewujudkan Nagari Madani di Nagari Lawang dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh

<sup>9</sup>. Anis Matta “*Dari Gerakan Ke Negara, Sebuah Rekonstruksi Negara Madinah Yang Dibangun Dari Bahan Dasar Sebuah Negara*” Dalam majalah Suara Hidayatullah [www.suara-hidayatullah.com](http://www.suara-hidayatullah.com)., 12 Oktober 2012.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Kabupaten Agam, serta menjalankan kegiatan demi kegiatan yang menjadi indikator sebuah nagari itu bisa dikatakan Nagari Madani. Setelah itu tentu adanya pengawasan serta pembinaan dan evaluasi yang dilakukan pemerintah Nagari Lawang setiap tahunnya terhadap pelaksanaan gerakan Nagari Madani di Nagari Lawang sesuai ketentuan pasal yang ada pada Perbup No 74 tahun 2016, dan tentunya semua biaya pelaksanaan Gerakan Nagari Madani di Nagari Lawang akan di bebaskan kepada APBD Kabupaten Agam dan APBD Nagari Lawang.

Sementara itu realita yang terlihat dilapangan ( Nagari Lawang ) sesuai dengan maksud dan tujuan yang sudah disampaikan dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang No 74 Th 2016 dan gambaran umum Nabi membangun Masyarakat madinah, secara teori dan aturan sudah jelas, namun secara pelaksanaan masih kurang berjalan dengan baik dan masih jauh untuk terpenuhinya maksud dan tujuan Nagari Madani tersebut. Hal itu terletak pada Pasal 4 bahwa sasaran Gerakan Nagari Madani ini adalah pemerintahan dan Masyarakat, namun pemerintah dan masyarakat masih kurang termotivasi untuk terjun langsung mengikuti dan meninjau kegiatan dan program demi terciptanya Nagari Madani. Serta kurangnya pembinaan serta evaluasi sehingga Nagari Madani tidak maksimal terlaksana di Nagari Lawang yang merupakan nagari percontohan Gerakan Nagari Madani. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas lebih tuntas tentang Nagari Madani dengan dengan Fokus pembahasan **Implementasi Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Nagari Madani Di Nagari**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## **Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam Menurut Perspektif Fiqh Siyasah.**

### **2. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini menjadi lebih terarah, maka diperlukan batasan masalah yang akan diteliti nantinya. Penelitian ini difokuskan kepada Implementasi atau Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Nagari Madani Di Nagari Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam Ditinjau Menurut Persepektif Fiqh Siyasah.

### **3. Rumusan Masalah**

- A. Bagaimana pelaksanaan Perbup No 74 Th 2016 tentang Nagari Madani di Nagari Lawang ?
- B. Apa faktor yang mempengaruhi Penerapan Nagari Madani di Nagari Lawang?
- C. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan Perbup No 74 Th 2016 tentang Nagari Madani di Nagari Lawang?

### **4. Kegunaan dan Manfaat Penelitian**

#### **A. Kegunaan Penelitian**

Adapun dalam penelitian ini memiliki kegunaan diantaranya :

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah keilmuan dan cakrawala pengetahuan hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah).
2. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu perpolitikan Islam yang memiliki kaitan dengan hukum yang ada di zaman modern saat ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kebijakan pemimpin dalam mengeluarkan peraturan perundang-undangan.
4. Dapat menjadi bahan kajian hukum islam apabila suatu saat diperlukan.

#### B. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan untuk menambah ilmu pengetahuan terkait masalah yang diteliti. Sekaligus untuk mengetahui implemetasi Peraturan Bupati Tentang Gerakan Nagari Madani di nagari Lawang, dan menjadi sumbangan bagi khazanah keilmuan terutama jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Mahasiswa serta masyarakat pada umumnya terkait pemahaman tentang hukum.
2. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

#### 5. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu usaha atau proses untuk mencari jawaban atas suatu pertanyaan atau masalah dengan sabar dan hati-hati, terencana, sistematis, atau dengan cara ilmiah, dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta atau prinsip-prinsip, mengembangkan dan menguji kebenaran ilmiah suatu pengetahuan.<sup>10</sup> Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik dan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

---

<sup>10</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Mitra Wacana Media 2012), hal 12.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

## **1. Jenis penelitian**

Dihat dari jenis penelitian ini termasuk penelitian *Yuridis Sosiologis* yaitu dengan cara melakukan survey langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan data sekunder yang didapatkan langsung dari responden melalui wawancara dan angket. dan kajian kepustakaan yaitu melalui serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data kepustakaan, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

## **2. Lokasi penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Nagari Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam Sumatera Barat, yang merupakan salah satu Nagari yang menjadi Pilot Project Nagari Madani di Kabupaten Agam.

## **3. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Nagari Lawang dan Tokoh-Tokoh Masyarakat. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Peraturan Bupati No 74 tahun 2016 serta tinjauan menurut perspektif Fiqh Siyasah.

## **4. Sumber dan Jenis Data**

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau objeknya.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini sumber datanya adalah data yang diperoleh langsung dari responden, ( Pemerintah Nagari Lawang, Tokoh

<sup>11</sup> Amiruddin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Rajawali Persada, 2003), hal. 30.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adat, Tokoh Ulama, Tokoh Muda, dan Pemerintah jorong/RW, serta kajian pustaka yang berkenaan dengan yang diteliti.

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.<sup>12</sup> dalam penelitian ini, sumber data Sekunder yang digunakan adalah Buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan, Dokumen Nagari, Data-data Nagari Lawang, Peraturan Bupati No 74 Th 2016, dll.

#### 5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari subjek yang menjadi penelitian yang ditentukan sebelumnya.<sup>13</sup> Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu dan tempat, dengan sifat dan ciri yang sama. Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.<sup>14</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah 1 dari Pemerintah Nagari Lawang, 1 dari Tokoh Adat, 1 dari Alim Ulama, 1 dari Tokoh Muda dan 1 dari Pemerintah Jorong/RW. Karena jumlah yang sedikit, semuanya diteliti (Total Sampling).

#### 6. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 30.

<sup>13</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 98

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2011),

hal. 16.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Observasi suatu studi yang dilakukan dengan sengaja atau terencana dan sistematis melalui penglihatan atau pengamatan terhadap gejala-gejala spontan yang terjadi saat itu.<sup>15</sup>

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran anatar pribadi bertatap muka (face to face) ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.<sup>16</sup> Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan yang diwawancarai, dalam penelitian ini yaitu wawancara langsung dengan pemerintah Nagari Lawang, tokoh adat seperti Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai serta sebagian Tokoh Masyarakat yang ada di Nagari Lawang.

c. Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.

d. Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah menggambarkan data yang diperoleh akan dianalisis dengan cara memaparkan secara umum hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas, serta

<sup>15</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta,2014) h. 64

<sup>16</sup> Juliansyaah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, tesis, Disertasi, dan karya ilmiah*, (Jakarta:Kencana, 2011), Edisi ke-1, cet ke-1, h.138



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menguraikannya guna memberikan gambaran yang jelas.<sup>17</sup> Analisis data dilakukan analisis deskriptif kualitatif dimana metode ini adalah penjabaran kata-kata yang didukung dengan data wawancara dan hasil observasi langsung dan data-data lainnya. Kemudian penulis menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus mengenai masalah yang diteliti.

## **6. Sistematika Penulisan**

Agar penelitian ini terarah dan sistematis, maka pembahasan pada skripsi ini nantinya dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang digambarkan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian kegunaan, manfaat, penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM NAGARI LAWANG**

Pada bab ini berisi data penelitian yang memaparkan tentang Gambaran umum lokasi penelitian berisikan tentang sekilas gambaran tentang sejarah serta landasan terbentuknya Nagari Lawang, Visi Misi Nagari Lawang, kondisi Geografis, kondisi pendidikan, kondisi keagamaan, serta jumlah penduduk Nagari Lawang.

<sup>17</sup> Perjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984, hal. 28



### BAB III

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

### BAB IV

### BAB V

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### : KONSEP TEORITIS

Pada bab ini berisikan tentang teori-teori Fiqh Siyasah, dan gambaran umum tentang Nagari Madani, konsep Madani di masa Nabi, konsep Madani Zaman Modern serta konsep Madani pada Peraturan Daerah Nomor 74 Tahun 2016.

### : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang pelaksanaan Nagari Madani di Nagari Lawang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016, faktor yang mempengaruhi Penerapan Nagari Madani di Nagari Lawang serta tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2016.

### : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM NAGARI LAWANG

#### A. Sejarah Nagari Lawang

Lawang berasal dari kata Lawang - Lowong - kosong atau sebagai tempat yang belum berpenghuni atau didiami. Didaerah Lawang dahulunya banyak terdapat pohon kayu yang bernama kayu “Lawang” maka oleh pendatang terdahulu dinamakan daerah ini Lawang. Lawang berasal dari bahasa daerah lain berarti “pintu” yaitu pintu masuk.

Nagari Lawang mulai didiami kira-kira pada abad ke 13 Masehi oleh pendatang-pendatang terdahulu. Asal usul pendatang yang pertama kali datang ke Nagari Lawang berjumlah 13 (tiga belas) orang yang berasal dari Kamang dengan melalui nagari andalas menuju Lawang Tuo dan berhenti sebelah barat dari panti asuhan yang ada sekarang yaitu bernama “tampaik”.<sup>18</sup>

Nagari Lawang terletak di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam. Dipimpin oleh wali nagari yang diwakili oleh 6 Jorong sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Nagari. Sedangkan dalam menata nagari, Wali Nagari dibantu oleh BAMUS, KAN, Bundo Kandung, MUI, dan lembaga-lembaga lain.

#### B. Landasan Terbentuknya Nagari lawang

Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

<sup>18</sup> Sumber Data: *Dokumen Nagari Lawang Kecamatan Matur* 29 Juli 2021.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© hak cipta milik UIN Suska Riau

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nagari merupakan kumpulan dari beberapa Jorong/Korong yang memiliki tujuan dan prinsip yang sama. Nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari. Wali Nagari ini dipilih melalui musyawarah dan mufakat dari berbagai kumpulan Jorong dan masyarakat melalui pemilihan wali nagari (Pilwana). Pada konteks sistem pemerintahan, informan memaknai nagari sebagai kesatuan pemerintahan terkecil dari kerajaan Minangkabau yang memiliki otonomi mutlak. Nagari dimaknai juga sebagai sebuah pemerintahan yang dikepalai oleh wali nagari yang didampingi oleh lembaga nagari Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan Peraturan Daerah No.12 Tahun 2007, di samping ada lembaga lain yang memiliki kekuasaan tertinggi yang disebut Kerapatan Adat Nagari.<sup>19</sup>

#### C. Kondisi Geografis Nagari Lawang

Nagari Lawang adalah Nagari yang terletak di Kecamatan Matur Kabupaten Agam. Secara geografis Nagari Lawang merupakan dataran tinggi dengan ketinggian 1.031 meter dari permukaan laut, Nagari ini memiliki luas nagari 1.669ha, dan keadaan suhu rata-rata 25-29<sup>0</sup> C.

Nagari Lawang terletak di Kecamatan Matur dengan batas daerah sebagai berikut:<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Rusyda Fauzana, *Makna Nagari sebagai Representasi Sistem Desentralisasi Bagi Masyarakat Minangkabau*, hal 3.

<sup>20</sup> Sumber Data: *Dokumen Nagari Lawang Kecamatan Matur* 29 Juli 2021.

**Tabel I: Batas Wilayah**

Letak Batas	Nagari	Jenis Batas
Sebelah Utara	Kec. Palembayan	Jalan Raya
Sebelah Selatan	Nagari Matua Mudiak	Jalan Raya
Sebelah Barat	Kec. Tanjung Raya	Bukit
Sebelah Timur	Nagari Tigo Balai	Jalan Raya

Sumber: Profil Nagari

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa nagari Lawang berbatasan dengan Palembayan, Nagari Matua Mudiak, Tanjung Raya, dan Nagari Tigo Balai.

### Topografi/Bentang Lahan

**Tabel II: Topografi/Bentang Lahan**

No	Bentang Lahan	Luas (Ha)
1	Daratan	158.566 ha
2	Perbukitan	1.031 ha

Sumber: Profil Nagari

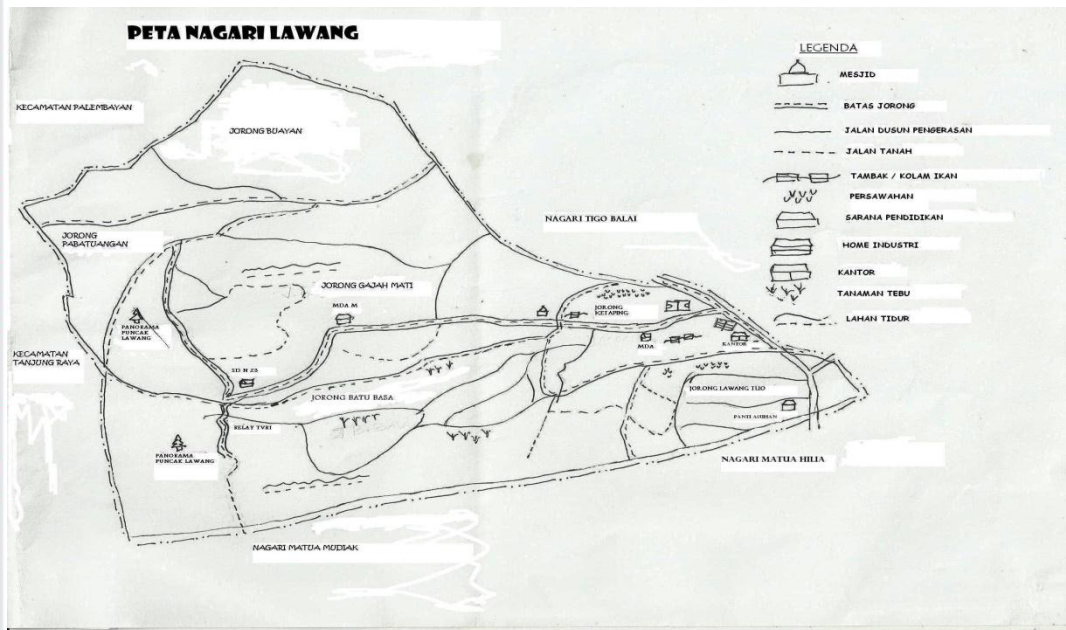
Data di atas menunjukkan bahwa daerah nagari Lawang adalah daerah yang terletak di daerah yang berbukitan dengan kapasitas daratan 1.031 Ha. Daratan yang luas inilah yang nanti mendukung sektor pertanian daerah itu sendiri.<sup>21</sup>

<sup>21</sup> Sumber Data: *Dokumen Nagari Lawang Kecamatan Matur* 29 Juli 2021.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Peta Nagari Lawang :



## D. Visi Dan Misi Nagari Lawang

### 1. Visi

Visi adalah suatu pandangan kedepan yang harus dicapai dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan yang harus dihadapi oleh suatu wilayah yang akan menjadi komitmen bersama semua pihak termasuk masyarakat, dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan enak tahun kedepan Lawang menetapkan Visi **‘Terwujudnya Nagari Lawang Yang Sejahtera, Makmur dan Madani.’**<sup>22</sup>

Terbebas dari keterbelakangan mengandung pengertian bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nagari dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan menjadikan masyarakat yang berakhlak mulia dan

<sup>22</sup> Sumber Data: *Dokumen Nagari Lawang Kecamatan Matur* 29 Juli 2021.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memahami adat istiadat yang berlaku di nagari. Kesejahteraan masyarakat mengandung arti masyarakat mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diukur dengan parameter.

## 2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut diatas, maka diperlukan penjabaran lebih terperinci dari visi, dituangkan didalam misi nagari sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan transparan
- b. Meningkatkan ekonomi masyarakat yang merata
- c. Meningkatkan sumber daya manusia yang terarah dan berkesinambungan
- d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur saran dan prasarana fasilitas Nagari
- e. Meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat serta penataan lingkungan yang bersih dan sehat
- f. Menjalin kerjasama yang berkelanjutan dan bermanfaat dengan perantau dalam pembangunan Nagari

## E. Struktur dan Jumlah pegawai Pemerintahan Nagari Lawang

Secara struktur tentang kepemimpinan nagari akan digambarkan sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Wali Nagari : Pj. Akhirul Tasbar
2. Sekretaris : Serli Yunika Putri,S.HI

<sup>23</sup> Sumber Data: *Dokumen Nagari Lawang Kecamatan Matur* 29 Juli 2021.

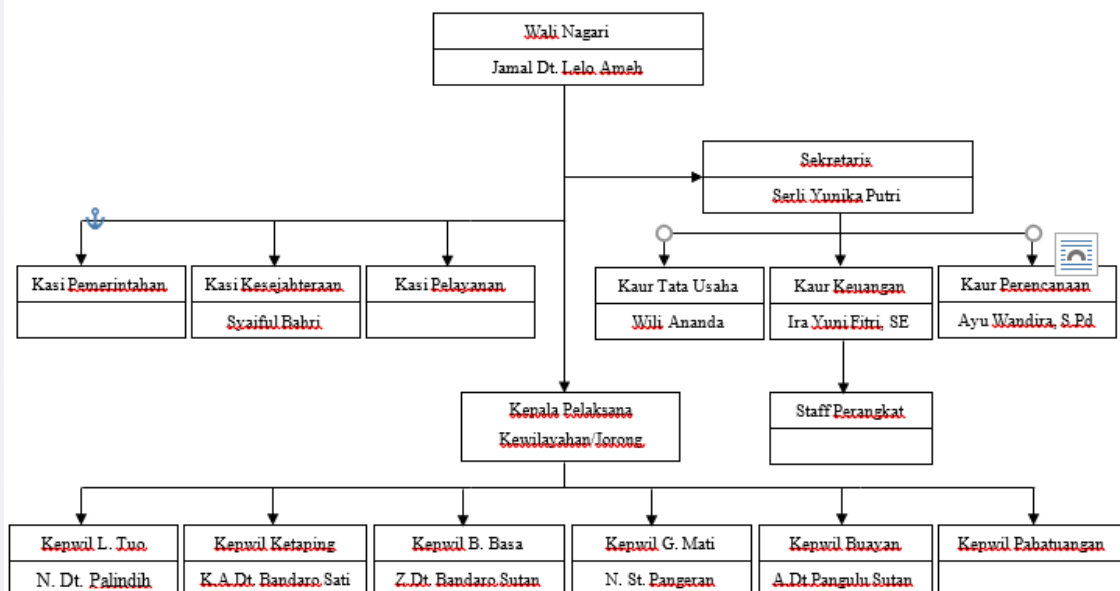
<sup>24</sup> Sumber Data: *Dokumen Nagari Lawang Kecamatan Matur* 29 Juli 2021.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Bendahara : Fitri Mayunis
  4. Kaur Keuangan dan Aset : N.St. Sari Ali
  5. Kaur Pembangunan : Syaiful Bahri
  6. Kaur Sosial dan Masyarakat : A. Dt.Nan Kodoh Nan Tuo
- Jorong yang ada di Nagari Lawang yaitu, 6 jorong;<sup>25</sup>
1. Jorong Lawang Tuo : Doni Dt. Palindih
  2. Jorong Batu Basa : Z. Dt. Bandaro Sutan
  3. Jorong Gajah Mati : A.St.Pangeran
  4. Jorong Ketaping : H.A.Kht.Sutan Bandaro

### Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Lawang



### 2. Bendahara Nagari

Bendahara nagari bertugas mengkoordinir semua yang bersangkutan

<sup>25</sup> Sumber Data: *Dokumen Nagari Lawang Kecamatan Matur* 29 Juli 2021.

<sup>26</sup> Sumber Data: *Dokumen Nagari Lawang Kecamatan Matur* 29 Juli 2021.

<sup>27</sup> Sumber Data: *Dokumen Nagari Lawang Kecamatan Matur* 29 Juli 2021.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

dengan keuangan nagari.

- a. Kaur keuangan bertugas mengurus segala dana yang akan dibutuhkan oleh nagari dalam pembangunannya yang kemudian akan diberitahukan kepada bendahara.
- b. Kaur pembangunan bertugas dalam perencanaan pembangunan nagari yang kemudian membuat proposalnya untuk memohon persetujuan supaya dana dapat turun.
- c. Kaur Sosial dan Masyarakat bertugas dalam penanganan kebutuhan masyarakat umum yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat nagari tersebut.
- d. Kaur Keuangan dan Aset bertugas menangani masalah keuangan yang berfungsi membantu bendahara nagari dalam masalah yang bersangkutan dengan dana dan menangani masalah sumber-sumber pemasukan dan aset nagari.

Jumlah Pegawai yang bertugas di kantor wali nagari Lawang adalah sebanyak 9 orang yang terdiri dari wali nagari, sekretaris nagari, kaur tata usaha, kaur keuangan, kaur perencanaan, kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan, kasi pelayanan, dan staff perangkat.

### F. Jumlah penduduk

1. Jumlah Penduduk

Penduduk Nagari Lawang terdiri dari penduduk asli yang bertempat tinggal secara tetap dan telah memiliki keturunan di nagari Lawang ini



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan bukti memiliki tanah basah dan tanah kering, serta memiliki rumah *gadang* sebagai tempat bagi keturunan buah *gadang* suku mereka. Adapun jumlah penduduk di Nagari Lawang ini berdasarkan data kependudukan (Profil Nagari) yang dimiliki Nagari Lawang dalam statistiknya. Di Nagari Lawang terdapat 4 (empat) suku yang dipimpin oleh 30 orang datuak yaitu:<sup>28</sup>

- a. Suku Pili dibawahhi oleh Datuak Putih Nan Tuo, Datuak Putih Lawang, Datuak Bunsu Lawang, Datuak Bunsu Kampuang, Datuak Bagindo Basa, Datuak Mudo dan Datuak Tan Majo Basa.
- b. Suku Caniago dibawahhi oleh Datuak Nan Kodoh Nan tuo, Datuak Kodoh Rajo, Datuak Nan Kodoh Nan Hitam, Datuak Nan Kodoh Nan Kuniang, Datuak Simarajo Nan Panjang, Datuak Simarajo Nan Labiah, Datuak Sinaro, Datuak Tinaro Nan Hitam dan Datuak Tan Marajo.
- c. Suku Tanjuang dibawahhi oleh Datuak Rajo Pangulu Nan Tuo, Datuak Rajo Pangulu Kampuang, Datuak Rajo Pangulu Nan Tinggi, Datuak Rajo Pangulu Nan Kuniang, Datuak Rajo Basa, Datuak Rajo Endah dan Datuak Bagindo Marajo.
- d. Suku Sikumbang dibawahhi oleh Datuak Mangkudun Nan Tuo, Datuak Majo Kayo Nan Tinggi, Datuak Majo Kayo Lawang, Datuak Mangkudun Nan Kuniang, Datuak Majo Kayo Nan Kuniang dan Datuak Rajo Agam.

<sup>28</sup> Sumber Data: *Dokumen Nagari Lawang Kecamatan Matur* 29 Juli 2021.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Jumlah penduduk seluruhnya 5.837 jiwa
- Jumlah kepala keluarga 1.037 KK

**Tabel III: Jumlah kepala Keluarga 2.525 KK**

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0-11 bulan	55 orang	48 orang	103 orang
2	1-5 tahun	135 orang	128 orang	263 orang
3	5-6 tahun	96 orang	101 orang	197 orang
4	7-12 tahun	137 orang	162 orang	299 orang
5	13-15 tahun	115 orang	125 orang	240 orang
6	16-18 tahun	108 orang	115 orang	223 orang
7	19-25 tahun	199 orang	204 orang	403 orang
8	26-34 tahun	216 orang	221 orang	437 orang
9	35-49 tahun	253 orang	283 orang	536 orang
10	50-54 tahun	125 orang	105 orang	230 orang
11	55-59 tahun	94 orang	98 orang	192 orang
12	60-64 tahun	77 orang	64 orang	141 orang
13	65-69 tahun	60 orang	67 orang	127 orang
14	70-75 tahun	90 orang	125 orang	215 orang

Sumber: Profil Nagari

Catatan:

- Peraturan menteri tenaga kerja No.01.Men/1987 tentang perlindungan terhadap anak terpaksa kerja. Usia di bawah 15 tahun yang bekerja

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan memperoleh imbalan baik berupa uang ataupun barang tergolong anak terpaksa bekerja.

#### 2) Penggolongan usia rata-rata:

##### a) Penggolongan usia berdasarkan Pendidikan

Kurang dari 11 bulan	: Bayi
1-5 Tahun	: Balita
5-6 Tahun	: TK
7-12 Tahun	: SD
13-15 Tahun	: SLTP
16-18 Tahun	: SLTA
19-25 Tahun	: Perguruan Tinggi

##### b) Lain-lain

0-15 Tahun	: Anak-anak (non produktif)
15-49 Tahun	: Usia Subur
15-64 Tahun	: Dewasa
61-65 Tahun	: Usia Tua (Lanjut Usia)

#### 4. Kepadatan penduduk

**Tabel IV: Kepadatan Penduduk**

No	Keterangan	Jumlah
1	Laki-laki	2.895
2	Perempuan	2.942



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>Jumlah seluruhnya</b>	5.837
--------------------------	-------

Sumber: Profil Nagari

Dari data di atas dapat dilihat bahwa dalam perkembangan penduduk maka perkembangan penduduk perempuan memiliki titik perkembangan yang lebih dari laki-laki. Dengan data perubahan perkembangan jumlah penduduk:<sup>29</sup>

#### 5. Perubahan Jumlah Penduduk

**Tabel V: Mobilitas Penduduk**

No	Keterangan	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Lahir	30	37
2	Meninggal Dunia	22	15
3	Penduduk Masuk	19	10
4	Penduduk Keluar	24	20
<b>Jumlah</b>		<b>95</b>	<b>82</b>

Sumber: Profil Nagari

Tabel di atas menggambarkan bahwa tingkat kelahiran di nagari Lawang tergolong tinggi jika dibandingkan dengan orang yang meninggal dan penduduk yang keluar pun tinggi dari penduduk yang masuk.

<sup>29</sup> Sumber Data: Dokumen Nagari Lawang Kecamatan Matur 29 Juli 2021.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

6. Penyebaran Penduduk

**Jumlah dan Penyebaran Penduduk Nagari Lawang Tahun 2020**

No	Nama Jorong	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah KK
1	Batu Basa	400 Orang.	390 Orang	790Orang	229 KK
2	Buayan <sup>30</sup>	54 Orang	55 Orang	109 Orang	35 KK
3	Gajah Mati	691 Orang	690 orang	1.381 Orang	389 KK
4	Katapiang	471 Orang	451 Orang	922 Orang	261 KK
5	Lawang Tuo	344 Orang	343 Orang	687 Orang	192 KK
6	Pabatuangan	62 Orang	70 Orang	132 Orang	40 KK
<b>Jumlah</b>		<b>2.022 Orang</b>	<b>1.999 Orang</b>	<b>4.021 Orang</b>	<b>1.146 KK</b>

**G. Kondisi Pendidikan**

Maju mundurnya suatu peradaban masyarakat akan ditentukan oleh kondisi pendidikan masyarakatnya. Maka lembaga pendidikan sangat mempunyai peranan penting dalam kemajuan masyarakat suatu daerah. Bila sarana pendidikannya terpenuhi dan dimanfaatkan dengan baik maka masyarakat tersebut akan lebih cepat dalam mencapai kemajuan. Akan tetapi sebaliknya, apabila sarana pendidikan tidak sanggup mengiringi kemajuan zaman maka kemajuan masyarakatnya akan terbelakang dibanding daerah yang memiliki sarana pendidikan yang lebih mapan.

Pendidikan akan menjadi tumpuan dan harapan serta keinginan manusia yang melihat perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai dewasa ini maka

<sup>30</sup> Sumber Data : DKB Semester I Tahun 2020

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Setiap pribadi dan masyarakat dituntut untuk mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu berkompetensi secara sehat dalam rangka tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan hidup.

Adapun fasilitas pendidikan yang tersedia di Nagari Lawang terdiri dari PAUD, Taman kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Dengan kualitas kerja dalam klasifikasi pendidikan sebagai berikut:

**Tabel VI: Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah
1	Lulusan Pendidikan Umum	
	Taman Kanak-kanak	43 Orang
	Sekolah Dasar	311 Orang
	SLTP	424 Orang
	SLTA	393 Orang
	Akademi (D1-D3)	28 Orang
	Sarjana ( S1-S2 )	133 Orang
2	Lulusan Pendidikan Khusus	
	Pendidikan Pesantren	17 Orang
	Madrasah	453 Orang
	Pendidikan Keagamaan	154 Orang
	Pendidikan Kesetaraan	26 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>1.982 Orang</b>

Sumber: Profil Nagari



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data di atas menggambarkan bahwa dari segi pendidikan masyarakat Lawang memiliki pendidikan terbanyak itu tamatan Pesantren jika dilihat dari jumlah penduduk dari segi pendidikan.

### H. Kondisi keagamaan

Masyarakat Nagari Lawang 100% beragama Islam (Muslim). Ini adalah bukti sejarah bahwa masuknya Islam di Minangkabau. Karena begitu pesatnya penyebaran Islam di wilayah Minangkabau, adat yang telah lama dianut oleh masyarakat menyatu dengan ajaran Islam.<sup>31</sup> Sesuai dengan falsafah adat minangkabau “*Adat basandi syara’, Syara’ basandi Kitabullah*”.

Berbicara tentang agama memerlukan suatu sikap yang ekstra hati-hati. Sebab agama merupakan persoalan sosial, tetapi penghayatannya bersifat individual. Agama merupakan pedoman hidup dan menjadi tolak ukur yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Sumatera Barat, Nagari Lawang dengan pengunjung wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara ratusan ribu setiap tahunnya. Untuk mengantisipasi pengaruh budaya luar, Ketakutan akan budarnya kebiasaan-kebiasaan dan norma-norma agama Islam yang berlaku karena masuknya budaya asing, maka pemerintahan Nagari Lawang membuat beberapa organisasi keagamaan untuk membentengi masyarakat agar tidak terpengaruh akan budaya luar.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Taufik Efendi, *Modul Penguatan Pemangku Adat Minangkabau*, (Padang: Dinas Kebudayaan Sumatera Barat, 2018), hal. 23

<sup>32</sup> A. Dt.Nan Kodoh Nan Tuo (kaur sosial dan kemasyarakatan nagari Lawang), wawancara pribadi, 21 mei 2020

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Beberapa organisasi sosial keagamaan di Nagari Lawang antara lain Majelis Taklim, Remaja Masjid, organisasi Muhammadiyah dan Aisyiyah, dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di Nagari Lawang yaitu wirid yasin oleh majelis taklim setiap hari selasa, wirid mingguan pemuda Muhammadiyah, dan wirid mingguan wirid remaja masjid setiap sabtu malam.<sup>33</sup> Setiap hari jum'at hampir seluruh masjid yang ada di Nagari Lawang terbagi dalam beberapa jorong melaksanakan wirid yang diisi peramah oleh mubaligh dan ulama yang ada di nagari Lawang. Kegiatan keagamaan lain seperti tabligh akbar yang dilaksanakan pada setiap peringatan hari besar Islam. Tabligh akbar dilaksanakan oleh pemerintahan Nagari, beberapa pengurus masjid/mushala, pengurus madrasah dan remaja masjid.

Pelaksanaa kegiatan keagamaan di tengah masyarakat bertujuan untuk menegakkan hukum Islam dan menanamkan ajaran Islam dalam kehidupan. Dan bahkan untuk menjaga agar masyarakat tak terpengaruh oleh budaya luar yang masuk. Dari kegiatan keagamaan yang dilaksanakan ada fasilitas yang mendukung.

Adapun fasilitas pendidikan keagamaan di Nagari Lawang yaitu Madrasah Diniyah Awwaliyah (MDA), Taman Pendidikan Qur'an (TPQ), Madrasah Tsanawiyah (Mts), Madrasah Aliyah (MA), satu pondok pesantren dan nagari Lawang juga memiliki Kampuang Santri untuk para penghafal tahfiz.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> A. Dt.Nan Kodoh Nan Tuo (kaur sosial dan kemasyarakatan nagari Lawang), wawancara pribadi, 21 mei 2020

<sup>34</sup> Sumber Data: Dokumen Nagari Lawang Kecamatan Matur 24 April 2020.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### KONSEP TEORITIS

#### A. Teori Fiqh Siyasah

##### 1. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah merupakan tarkib idhofi yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata fiqh dan kata siyasah. Agar diperoleh pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud dengan Fiqh Siyasah, makaperlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah.<sup>35</sup>

Secara etimologi (bahasa) fiqh adalah pemahaman. Sedangkan fiqh secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah.<sup>36</sup> Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.<sup>37</sup>

Dalam sumber lain disebutkan defenis Fiqh secara umum ialah suatu ilmu yang mempelajari bermacam-macam syari'at atau hukum Islam

<sup>35</sup> Wahyu Abdul Jafar, "*Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Quran dan Al-Hadits*", *Al-Imarah*, Vol. 3, 1, (2018), h. 20.

<sup>36</sup> Nofiardi, "*Hukum Syara' dan Fiqh Menurut Wahbah Az-Zuhaili*", *Al-Hurriyah*, Vol. 12, 1, (2011), h. 63.

<sup>37</sup> M. Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Surabaya: Buku Pena Salasabila, 2013), h.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan berbagai macam aturan hidup bagi manusia, baik yang bersifat individu maupun yang berbentuk masyarakat sosial.<sup>38</sup>

Kata Siyasah berasal dari kata sasa, kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.<sup>39</sup> Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.<sup>40</sup>

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal *ihwal* urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>41</sup>

Hal ini sebagaimana termaktub di dalam Q. S An-Nisa' (4): 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika

<sup>38</sup> H. Nazar Bakry, *Fiqh dan ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 7.

<sup>39</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997), h. 89.

<sup>40</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 29.

<sup>41</sup> Syekh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*<sup>42</sup>

### Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang.<sup>43</sup>

Menurut Imam al-Mawardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan fiqh siyasah-nya yaitu *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut.<sup>44</sup>

- a. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*)
- b. Ekonomi dan militer (*siyasah maliyah*)
- c. Peradilan (*siyasah qadha'iyah*)
- d. Hukum perang (*siyasah harbiah*)
- e. Administrasi negara (*siyasah idariyah*)

Sedangkan menurut Imam Ibn Taimiyyah, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah*, ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut.<sup>45</sup>

<sup>42</sup> Hidayatullah Agus, *Alqur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemahan Per Kata*, (Bekasi : Cipta Bagus Segara, 2013), h. 87.

<sup>43</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Perdana Media Group, 2014), h. 15.

<sup>44</sup> Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Shulthaniyah*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1999), h. 55.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. *Siyasah Qadla`iyyah*
- b. *Siyasah `Idariyyah*
- c. *Siyasah Maliyyah*
- d. *Siyasah Dauliyyah (Siyasah Kharijiyyah)*

Sementara Abd al-Wahhab Khalâf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:<sup>46</sup>

- a. *Siyasah Qadla`iyyah*
- b. *Siyasah Dauliyyah*
- c. *Siyasah Maliyyah*

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, T. M. Hasbi, juga membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang berserta penerangannya, yaitu:<sup>47</sup>

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar`iyyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan)
- b. *Siyasah Tasyri`iyyah Syar`iyyah* (Kebijaksanaan tentang penetapan hukum)
- c. *Siyasah Qadla`iyyah Syar`iyyah* (kebijaksanaan peradilan)
- d. *Siyasah Maliyyah Syar`iyyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter)
- e. *Siyasah `Idariyyah Syar`iyyah* (kebijaksanaan administrasi negara)

<sup>45</sup> Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar`iyah fi Ishlah al-Ra`iy wa al-Ra`yati*, (Mesir: Daar al-Fikr, 1998), h. 61.

<sup>46</sup> Abdul Wahab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar`iyah au Nizham al-Daulah al-Islamiyyah*, (Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah, 1998), h. 25.

<sup>47</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 30.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyyah* (Kebijaksanaan hubungan luar negeri/Internasional)
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyyah* (politik pelaksanaan undang-undang)
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyyah* (politik peperangan).

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fiqh siyasah dapat di sederhanakan menjadi tiga bagian pokok.<sup>48</sup>

*Pertama*, politik perundang-undangan (*al-siyasah al-dusturiyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (tasyri'iyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.

*Kedua*, politik luar negeri (*al-siyasah al-kharijah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (*al-siyasah al-duali al-'am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.

*Ketiga*, politik keuangan dan moneter (*al-siyasah al-maliyah*). Permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.

### 3. Objek Kajian Siyasah

Objek kajian siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, warga negara dengan lembaga negara, lembaga negara dengan lembaga negara, baik yang bersifat intern suatu

<sup>48</sup> Mujaar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 41.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara atau yang bersifat ekstern suatu negara dalam berbagai bidang kehidupan.<sup>49</sup>

Objek kajian siyasah menurut Abdul Wahab Khallaf, yang termasuk objek pembahasan siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama, dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Sedangkan menurut Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, objek pembahasan siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya dengan mengingat persesuaian penadbirannya itu dengan jiwa syariah yang tidak kita peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah 'amah yang tetap.<sup>50</sup>

Dari penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka secara garis besar dapat diambil kesimpulan bahwa objek pembahasan siyasah adalah:<sup>51</sup>

- a. Peraturan perundang-undangan
- b. Pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan
- c. Hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan Negara

<sup>49</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, h. 46.

<sup>50</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, h. 40.

<sup>51</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 13.

## B. Gambaran Umum Nagari Madani

### 1. Pengertian Nagari Madani

Nagari Madani berasal dari dua kata yaitu Nagari dan Madani, adapun makna Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia.<sup>52</sup>

Sedangkan Madani adalah prinsip kehidupan mengandung nilai-nilai yang dikembangkan oleh nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam dalam menjalankan pemerintahan dan menata kehidupan masyarakat yang dijadikan sebagai nilai-nilai dasar kehidupan bermasyarakat yang didasarkan pada prinsip keadilan, musyawarah dan mufakat, nilai ukhuwah, memupuk rasa cinta tanah air dan pengakuan terhadap hak asasi setiap manusia.<sup>53</sup>

Sehingga dari dua kata itu digabung menjadi satu yakni Nagari Madani yang berarti Nagari yang Religius/islami yang ber peradaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada nilai-nilai, norma-norma, hukum dan moral Adat Basandi Syara', Syara' basandi Kitabullah, *Syara' mangato adaik mamakai*, masyarakat yang berlandaskan ukhuwah islamiyah,

<sup>52</sup> Peraturan Bupati Agam No. 74 Tahun 2016 Tentang *Pedoman Pelaksanaan Nagari Madani* Bab 1 Pasal 1.

<sup>53</sup> Peraturan Bupati Agam No. 74 Tahun 2016 Tentang *Pedoman Pelaksanaan Nagari Madani* Bab 1 Pasal 1 Ayat XIII.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghormati perbedaan, bersikap demokratis dan terbuka (*inklusif*), gotong royong dan kekeluargaan.<sup>54</sup>

Nagari dalam adat minangkabau merupakan kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang memiliki wilayah tertentu batas-batasnya, dalam hal ini memiliki harta kekayaan sendiri. Nagari juga merupakan lembaga pemerintah sekaligus merupakan lembaga kesatuan sosial utama yang dominan sebagai kesatuan lembaga masyarakat yang otonom.<sup>55</sup>

Nagari ialah republik mini yang jelas anggotanya, nagari punya pemerintahan sendiri, punya adat sendiri serta tata kehidupan keanggotaannya diakui. Sama halnya seperti negara Indonesia yang memiliki unsur-unsur seperti Mulai dari adanya rakyat, wilayah, juga pemerintah yang berdaulat. Bukan hanya itu, Nagari juga mendapat pengakuan yang sah dari negara Indonesia sebagai bagian dari Budaya dan Adat yang ada di Indonesia.<sup>56</sup>

Dengan adanya Pemerintah yang berdaulat, adanya rakyat dan wilayah suatu nagari ingin menjadikan wilayah kekuasaannya menjadi wilayah yang religius sesuai dengan yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW pada saat beliau memimpin kota suci Madinah.<sup>57</sup>

<sup>54</sup> Peraturan Bupati Agam No. 74 Tahun 2016 Tentang *Pedoman Pelaksanaan Nagari Madani* Bab 1 Pasal 1 Ayat IV.

<sup>55</sup> Afdhal Prima, "Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari: Antara Format Adat atau Format Negara" *JURIS*, Vol. 9, 1, (2010), h. 49.

<sup>56</sup> Afdhal Prima, "Sistem Pemerintahan Nagari" *Jom Fisip*, Vol. 1, 2, (2014), h. 2.

<sup>57</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyash: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 100.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun instrumen yang tergabung didalam suatu Nagari adalah Pemerintah Nagari, Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat. Dalam mewujudkan nagari yang madani tentunya yg berperan penting dalam mewujudkan ini adalah semua instrumen yang tergabung dalam suatu nagari dan yang menjadi sasaran gerakan nagari madani adalah pemerintah nagari dan masyarakat nagari.<sup>58</sup>

### 2. Maksud Dan Tujuan Nagari Madani

Maksud Gerakan Nagari Madani adalah untuk mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* (ABS-SBK) guna mewujudkan karakter masyarakat yang madani.<sup>59</sup> Adapun yang menjadi tujuan Gerakan Nagari Madani adalah sebagai berikut:

- a. Optimalisasi pendidikan informal terutama Al-qur'an (baca, pahami, amalkan, hafal).
- b. Peningkatan peranan masjid/surau sebagai sentral kehidupan sosial masyarakat.
- c. Pelaksanaan perlindungan atas kampung dan masyarakat nagari.
- d. Peningkatan rasa kepedulian sosial, ukhuwah islamiyah, kekeluargaan dan gotong royong.
- e. Penerapan adat, seni budaya dan olahraga yang sesuai dengan filosofi *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* (ABS SBK).

<sup>58</sup> Feri Kurniawan, dkk, "Efektivitas Kepemimpinan Tungku Tigo Sajarangan dalam Pembangunan Nagari", *Ranah Research*, Vol.2, 2, (2020), h. 128.

<sup>59</sup> Sarmen Aris, dkk, "Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Manggopoh di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam", *JISIP*, Vol. 4, 2, (2015), h. 394.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Peningkatan peran serta lembaga dan organisasi masyarakat.
- g. Peningkatan keshalehan individu dan sosial.<sup>60</sup>

### 3. Peran Dan Fungsi Nagari Madani

Nagari Madani berperan untuk mewujudkan falsafah adat minangkabau “Adat basandi Syara’, Syara’ basandi Kitabullah”. Adapun fungsi Nagari Madani yang terdapat dalam Peraturan Bupati Agam No. 74 Tahun 2016 adalah:<sup>61</sup>

- a. Secara fisik/zahir menjadikan Masjid/Mushalla yang ada di Nagari kembali ramai dan diramaikan dengan semua fungsi masjid sebagai sarana kehidupan sosial masyarakat, baik sebagai pusat ibadah, pendidikan dan dakwah, sosial keagamaan dan sosial ekonomi dll.
- b. Menghidupkan kembali substansi pendidikan surau sebagai muatan pendidikan karakter anak nagari secara terpadu dan berkesinambungan.
- c. Olah fikir (cerdas dan intelektual), insan intelektual yang cerdas, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, imajinatif, berfikir terbuka yang objektif.
- d. Olahraga dan rasa, membentuk generasi yang sehat, bugar, berdaya tahan, sigap, terampil, Tangguh, bersahabat, sportif, disiplin, kompetitif, koperatif, dan ceria.

Adapun dalam pasal selanjutnya juga disebutkan bahwa:

- a. Untuk mengoptimalisasi pendidikan informal terutama Al-Qur’an.

<sup>60</sup> Peraturan Bupati Agam No. 74 Tahun 2016 Tentang *Pedoman Pelaksanaan Nagari Madani* Bab 2 Pasal 3.

<sup>61</sup> Bab III Pasal 5.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sebagai bentuk perlindungan atas kampung dan masyarakat nagari.
- c. Meningkatkan rasa kepedulian sosial ukhuwah islamiyah kekeluargaan dan gotong royong.
- d. Meningkatkan penerapan, seni budaya dan olahraga yang sesuai dengan filosofi *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* (ABS-SBK).
- e. Meningkatkan peran serta lembaga dan organisasi masyarakat.
- f. Meningkatkan keshalehan individu dan sosial.<sup>62</sup>

#### 4. Visi dan Misi Nagari Madani di Nagari Lawang

Adapun yang menjadi Visi nagari lawang dalam mewujudkan Nagari Madani adalah “*Mewujudkan Nagari Lawang yang Sejahtera, Makmur dan Madani*“.<sup>63</sup>

Adapun Misi Nagari Madani adalah:<sup>64</sup>

- a. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan transparan
- b. Terwujudnya Peningkatan Ekonomi masyarakat yang merata
- c. Terwujudnya Peningkatan Sumber Daya Manusia yang terarah dan berkesinambungan
- d. Terwujudnya Peningkatan pembangunan infrastruktur Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum Nagari
- e. Terwujudnya Peningkatan Derajat dan Kualitas Kesehatan Masyarakat serta Penataan Lingkungan yang bersih dan sehat

<sup>62</sup> Bab III Pasal 6.

<sup>63</sup> Sumber Data: *Dokumen Nagari Lawang Kecamatan Matur* 2021.

<sup>64</sup> Sumber Data: *Dokumen Nagari Lawang Kecamatan Matur* 2021.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Terjalannya kerjasama yang berkelanjutan dan bermanfaat dengan perantau dalam Pembangunan Nagari
- g. Menanamkan Nilai-nilai Islami yang merupakan jati diri masyarakat yang telah mengakar pada perilaku kehidupan sehari-hari, sehingga Falsafah “*Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah* “ dapat terwujud seperti yang diharapkan.

**C. Konsep Madani Zaman Nabi dan Modern**

**1. Konsep Madani Zaman Nabi**

Istilah madani merujuk pada idealitas sejarah Islam periode Madinah. Hadirnya nilai-nilai keadaban dalam masyarakat madani adalah sesuatu yang pokok. Perkataan “madinah” dalam istilah modern menunjuk pada pengertian *civil society* yang berarti masyarakat sopan, teratur, dan beradab dalam negara yang baik. Dengan demikian, masyarakat madani tidak hanya meliputi individu dan kelompok dalam masyarakat, tetapi juga ikatan yang lebih kompleks yaitu negara.<sup>65</sup>

Masyarakat madani bermula dari perjuangan Nabi Muhammad SAW menghadapi kondisi jahiliyah masyarakat Arab Quraisy di Makkah. Beliau memperjuangkan kedaulatan agar umatnya leluasa menjalankan syari’at agama di bawah suatu perlindungan hukum. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya hijrah dari Makkah ke Madinah. Tujuan hijrah tersebut adalah untuk menyelamatkan aqidah dan sebuah

<sup>65</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 20.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sikap optimisme dalam mewujudkan cita-cita membentuk masyarakat yang beradab.<sup>66</sup>

Saat berada di Madinah, Nabi Muhammad SAW memulai proyek kemasyarakatan dengan melakukan konsolidasi, baik di kalangan internal umat Islam maupun dengan orang-orang Yahudi. Nabi menyadari bahwa sebuah tatanan masyarakat baru tidak mungkin berdiri tanpa adanya penghargaan terhadap perbedaan. Semua komponen dalam masyarakat yang secara sosial yang terpecah harus diikat dalam sebuah kesepakatan bersama untuk menciptakan kesejahteraan sekaligus menghadapi kekuatan dari luar yang ingin menghancurkan. Kesuksesan Nabi dalam hal ini ditandai dengan disepakatinya piagam Madinah yang melibatkan seluruh komponen masyarakat Madinah.<sup>67</sup>

Di Madinah, semua yang diajarkan oleh beliau tidak ada unsur pemaksaan agar orang-orang memeluk Islam seluruhnya. Rasulullah SAW tidak pernah memaksakan masyarakat non-muslim untuk mengikuti agama penguasa. Bahkan, melalui perjanjian di antara semua penduduk Madinah ditetapkan dasar-dasar toleransi demi terwujudnya kerukunan dan perdamaian. Selain itu, Rasulullah SAW juga mempersatukan masyarakat yang terpecah dalam sebuah ikatan bersama yang tunduk di bawah hukum dan kekuasaan yang disepakati bersama.<sup>68</sup>

<sup>66</sup> Munawir Sjadjali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), h. 16.

<sup>67</sup> Wawan Mas'udi, "Masyarakat Madani: Visi Etis Islam Tentang Civil Society", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 3, 2, (November 1999), h. 180.

<sup>68</sup> Hamid Al-Husaeni, *Riwayat Kehidupan Nabi Besar Muhammad SAW*, (Jakarta: Yayasan Al-Hamidy, 1992), h. 447.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dasar utama yang digunakan oleh Rasulullah SAW dalam mempersatukan masyarakat adalah egalitarianism, pluralisme, dan toleransi, serta praktek musyawarah untuk memutuskan urusan kemasyarakatannya. Tidak berlaku pemisahan agama dengan negara, maupun masyarakat dengan negara. Kehadiran negara bukan berarti menghapuskan keberadaan individu (warga masyarakat), justru kewarganegaraan memberi landasan dalam masyarakat madani.<sup>69</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Hud (11): 118-119 yang berbunyi:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (١١٨) إِلَّا مَنْ رَجِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (١١٩)

- Artinya: 118. “Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat.”
119. “Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu (keputusan-Nya) telah diatur bahwa sesungguhnya Aku akan memenuhi neraka Jahanam dengan jin dan manusia (yang durhaka) kesemuanya.”<sup>70</sup>

Diantara ciri-ciri masyarakat madani yang dibangun oleh Rasulullah SAW di kota madinah adalah:

- a. Egalitarian, yaitu persamaan hak di tengah-tengah masyarakat.

Mungkin inilah salah satu faktor pendorong mengapa para hamba

<sup>69</sup> Wawan Mas’udi, *Op.Cit*, h. 183.

<sup>70</sup> Hidayatullah Agus, *Alqur’an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemahan Per Kata*, (Bekasi : Cipta Bagus Segara, 2013), h. 235.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sahaya, kelompok terpinggirkan, kelas menengah dan bangsawan secara ikhlas berbondong-bondong masuk agama Islam.

- b. Penghargaan terhadap orang yang berprestasi bukan berdasarkan kesukuan, golongan dan kebangsaan.
- c. Keterbukaan partisipasi seluruh anggota masyarakat. Pada masa Rasulullah SAW diberi kebebasan demikian pula partisipasi aktif masyarakat dalam membangun negara Madinah.
- d. Penegakan hukum dan keadilan. Rasulullah SAW dalam hal ini cukup tegas bahkan ia bersabda “andai kata Fatimah putriku mencuri akan saya potong tangannya”. Maksudnya, siapa saja yang bersalah akan ditetapkan hukuman dan keadilan.
- e. Toleransi dan pluralisme, semangat tolong menolong benar-benar ditegakkan Rasulullah SAW, demikian pula semangat pluralis (keanekaragaman), agama, suku, golongan dan lainnya sangat dihormati dan dijunjung tinggi.
- f. Musyawarah, dalam setiap mengambil keputusan, politik Rasulullah SAW selalu menerapkan prinsip-prinsip musyawarah, yaitu kebersamaan dan kesepakatan. Prinsip yang ditegakkan Rasul Saw menunjukkan bahwa ia bukanlah pemimpin otoriter.<sup>71</sup>

Masyarakat dengan ciri-ciri seperti itulah yang dibangun oleh Nabi selama sepuluh tahun di Madinah. Robert N. Bellah, seorang sosiologi agama terkemuka menyebut masyarakat madani yang dibangun Nabi itu

<sup>71</sup> Adi Suryadi Culla, *Masyarakat Madani*, (Jakarta: Rajawali Press, 1999), h. 193-194.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai masyarakat yang untuk zaman dan tempatnya sangat modern, bahkan terlalu modern. Setelah Nabi wafat, masyarakat madani warisan nabi itu hanya berlangsung selama tiga puluh tahunan masa khulafaurrasyiddin. Setelah itu, sistem sosial madani dengan sistem yang lebih banyak diilhami oleh semangat kesukuan atau tribalisme Arab pra-Islam yang kemudian dikukuhkan dengan sistem dinasti keturunan atau geneologis sampai datangnya zaman modern sekarang.<sup>72</sup>

Konsep yang diterapkan oleh Rasulullah SAW pada saat beliau membangun kota Madinah setelah hijrah dari kota Makkah, Penataan negara yang digagas Rasulullah: *pertama*, membangun infrastruktur negara dengan masjid sebagai simbol dan perangkat utamanya, *kedua*, menciptakan kohesi sosial melalui proses persaudaraan antara dua komunitas yang berbeda komunitas Muhajirin dan komunitas Anshar dalam satu agama, *ketiga* membuat nota kesepakatan untuk hidup bersama komunitas lain sebagai sebuah masyarakat yang pluralistik yang mendiami wilayah yang sama dan *keempat* merancang sistem negara dengan konsep *jihad fi sabilillah*.<sup>73</sup>

Penduduk Madinah terdiri dari berbagai macam suku dan ras, seperti suku Aus, Khazraj, Quraisy begitu juga agama terdiri dari Islam, Nasrani, Yahudi Majusi, Sabiin bahkan ada kepercayaan lain selain lima yang disebut, seperti penyembahan terhadap nenek moyang dan berhala

<sup>72</sup> Muhammad Soim, "Miniatur Masyarakat Madani (Perspektif Pengembangan Masyarakat Islam)", *Jurnal Risalah*, Vol. 26, 1, (Maret 2015), h. 26.

<sup>73</sup> *Ibid*



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kelompok yang tidak bertuhan.<sup>74</sup> Oleh karena itu negara yang dibangun Rasulullah berdiri di tengah realitas yang pluralistik, tetapi sukses hidup berdampingan yang saling mendukung (*complementary*).

Pluralitas masyarakat Madinah diawali dari kedatangan kelompok Muhajirin dari Mekkah ke Madinah, yang mengakibatkan munculnya persoalan-persoalan sosial, ekonomi, dan sistem kemasyarakatan. Kondisi seperti itu, introduksi sistem persaudaraan menjadi sebuah kebutuhan mendesak dan harus segera diwujudkan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Rasulullah bersama semua unsur penduduk Madinah secara konkrit meletakkan dasar-dasar masyarakat Madinah. Dengan menempatkan garis ketentuan hidup bersama maka lahirlah sebuah kesepakatan dan terdokumentasi secara tertulis, itulah yang dikenal sebagai “Piagam Madinah” (*Mitsaq al-Madinah*) yang dianggap sebagai konstitusi tertulis pertama dalam sejarah kemanusiaan. Piagam ini tidak hanya canggih pada masanya tetapi sebagai spirit perkembangan kebiasaan konstitusional dan hukum dalam dunia Islam.<sup>75</sup>

Pada Piagam Madinah itu dikatakan bahwa, untuk pertama kalinya umat manusia diperkenalkan dengan antara lain: wawasan kebebasan, terutama di bidang agama dan ekonomi serta tanggung jawab sosial dan politik, khususnya pertahanan secara bersama-sama. Pada Piagam Madinah itu juga menempatkan hak individu menjalankan kebebasan memeluk

<sup>74</sup>. Dawam Rahardjo, *Paradigma al-Qur'an Metodologi Tafsir dan Kritik Sosial*, (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005), hlm. 152.

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm 152

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama, persatuan dan kesatuan, persaudaraan, perdamaian dan kedamaian, toleransi, keadilan dan kemajemukan.

Berangkat dari kemajemukan itulah, Rasulullah mempersatukan mereka berdasarkan tiga unsur, *pertama*, mereka hidup dalam wilayah Madinah sebagai tempat bersama untuk hidup dan bekerja bersama, *kedua*, mereka bersedia dipersatukan dalam satu umat untuk mewujudkan kerukunan dan kemashalahatan secara bersama dan *ketiga*, mereka menerima Rasulullah sebagai pemimpin tertinggi dan pemegang otoritas politik yang legal dalam kehidupan mereka dilengkapi dengan institusi Piagam Madinah yang berlaku bagi seluruh umat Madinah.

Institusi Piagam Madinah berjumlah 47 Pasal, secara formal mengatur hubungan sosial antara berbagai komponen masyarakat, yaitu: *pertama*, antara sesama muslim, bahwa sesama muslim adalah satu umat kendati mereka berbeda suku. *Kedua*, hubungan antara komunitas muslim dengan non muslim didasarkan pada prinsip bertetangga yang saling membantu, membela mereka yang teraniaya, saling menasehati dan menghormati kebebasan beragama.

Dari Piagam Madinah ini, paling tidak ada dua nilai dasar fundamental yang tertuang dalam mendirikan dan membangun negara Madinah: *pertama*, prinsip kesederajatan dan keadilan (*al-musawwah wa al-adalah*). *Kedua*, prinsip inklusif atau keterbukaan. Kedua nilai inilah dituangkan kedalam beberapa bentuk nilai humanis dan universal lainnya. Seperti konsistem (*i'tidal*), seimbang (*tawazun*), moderat (*tawasut*) dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

toleransi (*tasammuh*). Kesemua itu menjadi landasan ideal – operasional dalam menjalin hubungan sosial – kemasyarakatan yang mencakup semua aspek kehidupan baik politik, ekonomi, hukum maupun kebudayaan.<sup>76</sup>

Maka dari itu sebagaimana keterangan diatas jelaslah bagi kita bahwa Sebagai langkah awal dalam Membangun peradaban di kota Madinah Rasulullah SAW terlebih dahulu mendirikan bangunan masjid yang nantinya akan digunakan sebagai markas kegiatan dan tempat ibadah. Perkembangan umat Islam pada periode awal tidak lepas dari masjid. Masjid yang besar, indah dan bersih adalah dambaan kita, namun semua itu belum cukup apabila tidak ditunjang dengan kegiatan-kegiatan memakmurkan masjid.<sup>77</sup>

Masjid mencerminkan seluruh aktivitas umat, masjid menjadi pengukur dan indikator dari kesejahteraan umat baik lahir maupun batin. Oleh sebab itu, jika tidak ada masjid diwilayah yang berpenduduk agama Islam atau ada masjid ditengah penduduk Islam, tetapi tidak digunakan sebagai pusat kehidupan umat, ini akan menjadi isyarat negatif timbulnya *dis-orientasi* kehidupan umat. Dalam dua situasi ini, umat akan mengalami kebingungan dan menderita berbagai penyakit mental maupun fisik serta tidak dapat menikmati distribusi aliran ridha dan energi dari Allah SWT.<sup>78</sup>

<sup>76</sup> OpCit, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/isoshum/sosiologirefleksif/article/download/1157/1067>, hlm 47

<sup>77</sup> Sidi, Gazalba, *Masjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1971), hlm. 27

<sup>78</sup> Nana, Rukmana DW, *Masjid dan Dakwah, Merencanakan, membangun dan mengelola Masjid, mengemas substansi Dakwah, upaya pemecahan Krisis moral dan Spritual*, (Jakarta: Al-Fawardi Prima, 2002), hlm. 76.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masjid adalah suatu tempat (bangunan) yang fungsi utamanya sebagai tempat shalat bersujud menyembah Allah SWT. Firman Allah SWT dalam surat al-Jin ayat 18 : “Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping (menyembah) Allah.”

Disamping itu beliau juga mempersatukan umat Islam antara penduduk Madinah yakni kaum al-Anshar dengan para pendatang dari Mekkah yakni kaum al-Muhajirin, Menjalin hubungan persaudaraan antara seluruh penduduk Madinah dengan mengikat mereka semua dalam satu piagam yang kemudian dikenal dengan nama “Piagam Madinah”, Piagam Madinah dibuat pada tahun pertama hijriah, piagam yang berisi 47 pasal ini memuat peraturan dan hubungan antara berbagai komunitas dalam masyarakat Madinah yang majemuk.<sup>79</sup> Seperti orang-orang dari golongan Khazraj dan Aus yang telah berabad-abad lamanya bermusuhan. Sesudah mereka memeluk islam, lenyaplah dengan sendirinya semua rasa permusuhan yang lama itu dari dada mereka masing-masing. Dengan adanya persatuan dan persaudaraan yang begitu hebat dan mengagumkan itu tampaklah kemajuan Islam, berseri-serilah cahaya islam, dan berkibarlah bendera islam disegenap penjuru kota Madinah.<sup>80</sup> Hal inilah yang dituju dan dimaksud oleh firman Allah SWT dalam QS. Al-Anfal (8):

63,

<sup>79</sup> Nurcholish Madjid, *Fiqh Siyasah*, Jakarta : Prenadamedia group, 2014, hlm 37.

<sup>80</sup> <https://tafsirweb.com/2929-quran-surat-al-anfal-ayat-63>.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ  
وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan Yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman). Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Gagah lagi Maha Bijaksana”.<sup>81</sup>

Selanjutnya melakukan aktivitas yang menyejahterakan masyarakat dengan melakukan sensus penduduk muslim, membangun pasar serta menggali sekian banyak sumur yang kesemuanya merupakan kebutuhan masyarakat. Selain itu keadilan diterapkan secara utuh (tanpa kecuali) oleh Nabi, termasuk terhadap Muslim yang melanggar.

Sebagaimana QS. An-Nisa ayat 105

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۚ وَلَا تَكُنْ  
لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat”.<sup>82</sup>

Dalam ayat ini menguraikan betapa seorang Yahudi yang dituduh mencuri oleh seorang Muslim yang justru si Muslim munafik itulah pencurinya. Ayat tersebut turun untuk mengingatkan Nabi agar tidak terpengaruh dengan “keislaman” sang pencuri sehingga memenangkannya atas sang Yahudi itu. Demikian keadilan dimemenangkannya atas sang

<sup>81</sup> Hidayatullah Agus, *Alqur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemahan Per Kata*, (Bekasi : Cipta Bagus Segara, 2013), h. 185.

<sup>82</sup> Hidayatullah Agus, *Alqur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemahan Per Kata*, (Bekasi : Cipta Bagus Segara, 2013), h. 95.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yahudi itu. Demikian keadilan ditegakkan di tengah masyarakat plural yang dipimpin oleh Nabi. Kemudian Nabi juga mengajak umat Islam untuk bekerja sama dengan siapapun selama kerja tersebut dalam kebaikan.<sup>83</sup>

## 2. Konsep Madani Zaman Modern

Istilah masyarakat yang ideal pada saat sekarang ini dikenal dengan masyarakat madani, yaitu model masyarakat yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW selepas hijrah ke Madinah. Dunia mengakuinya sebagai model masyarakat yang paling maju pada saat itu. Pola masyarakat madani ini oleh orang barat disamakan dengan *civil society* yang dipandang modern oleh mereka. Karakteristik masyarakat madani dahulu yaitu pada zaman Nabi Muhammad SAW memiliki kesamaan dengan masyarakat madani pada zaman sekarang dari berbagai segi, terutama dari dasarnya, keragaman agama, suku, dan budayanya.<sup>84</sup>

Pada saat ini, perkembangan masyarakat madani kembali menorehkan secercah harapan. Hal ini dikarenakan adanya perluasan jaminan dalam hal pemenuhan hak-hak asasi setiap warga negara yang intinya mengarahkan pada aspek kemandirian dari setiap warga negara. Dari zaman orde lama sampai zaman modern saat ini, permasalahan perwujudan masyarakat madani di Indonesia selalu menunjukkan hal yang

<sup>83</sup> <https://tafsirweb.com/1637-quran-surat-an-nisa-ayat-105.html>.

<sup>84</sup> Syakiman M. Noer, *Indonesia Baru Menuju Masyarakat Madani*, (Padang: Baitul Hikmah, 2000 ), h. 5.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama. Beberapa permasalahan yang menjadi hambatan sekaligus tantangan dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia, yaitu:<sup>85</sup>

- a. Kaum cendekiawan semakin banyak tetapi cenderung berorientasi pada kekuasaan
- b. Kurang percaya diri untuk bersaing dan senantiasa merasa rendah diri.

Dengan adanya hambatan tersebut, maka diperlukan strategi agar kehidupan madani di zaman modern ini tetap tercapai dan terwujud.

Diantara strategi yang dapat dilakukan adalah:<sup>86</sup>

- a. Menggiatkan kembali peran kaum cendekiawan

Menggiatkan kembali peran kaum cendekiawan sering melahirkan sebuah kebangkitan baru pada masyarakat untuk lebih mengaktualisasikan eksistensinya. Di Indonesia, berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan organisasi cendekiawan sejenis dapat menghadirkan sebuah kesadaran dan keberanian untuk dapat membangkitkan nilai-nilai kemadani di kalangan masyarakat setempat.

- b. Strategi memperkuat supremasi hukum

Salah satu ciri masyarakat madani adalah keterikatan dengan norma-norma dan nilai-nilai hukum. Hal itu akan terwujud apabila adanya penegakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, hukum hendaklah menjadi panglima dan negara tunduk pada

<sup>85</sup> Suroto, "Konsep Masyarakat Madani di Indonesia dalam Masa Postmodern (Sebuah Analisis Kritis)", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 5, 9, (2015), h. 667.

<sup>86</sup> M. Dawam Rahardjo, "Masyarakat Madani Indonesia", *Jurnal Paramadina*, Vol. 1, 2, (1999), h. 26.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuasaan hukum serta tidak ikut campur dalam menentukan proses jalannya peradilan. Tegaknya keadilan hukum akan membangun kepercayaan bagi masyarakat.<sup>87</sup>

- c. Strategi melalui penanaman nilai-nilai kebudayaan dan nilai-nilai pendidikan

Penanaman nilai-nilai kebudayaan dan nilai-nilai pendidikan di masyarakat, keduanya saling berkaitan. Adanya penerapan kebudayaan maka akan menanamkan identitas masyarakat itu sendiri dan dengan nilai-nilai kebudayaan, maka nilai-nilai pendidikan akan terlaksana dengan sendirinya. Ketika keduanya berfungsi secara efektif maka sebagian besar masyarakat akan berkesempatan untuk mengembangkan sikapnya. Baik nilai-nilai kebudayaan maupun nilai-nilai pendidikan merupakan sebuah jembatan bagi terciptanya masyarakat yang mandiri dan terdidik sehingga mampu melakukan proses pengambilan keputusan bagi kemaslahatan dirinya maupun masyarakat.

- d. Strategi sosialisasi dan pendidikan hak asasi manusia

Cita-cita masyarakat madani yang menempatkan manusia dalam posisi pusat sulit tercapai apabila individu-individu dalam masyarakat dan negara tidak memahami dan menghormati hak asasi manusia. Untuk itu, mensosialisasikan dan melakukan pendidikan hak

<sup>87</sup> Muhammad AS. Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, (Jakarta: LPES, 1996), h. 30.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

asasi manusia merupakan salah satu strategi yang perlu dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat madani.<sup>88</sup>

Diantara strategi yang telah disebutkan di atas untuk mewujudkan kehidupan madani, maka strategi tersebut haruslah dilaksanakan dengan adanya kerjasama yang berlandaskan kebaikan serta ketakwaan agar terwujudnya kehidupan madani yang berperadaban seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Maidah (5): 2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ النَّبِيِّ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”<sup>89</sup>

Untuk menuju masyarakat madani, tidak ditempuh melalui proses yang cepat (revolusi), tetapi ditempuh melalui proses yang sistematis dan

<sup>88</sup> M. Dawam Rahardjo, “Masyarakat Madani Indonesia”, h. 27.

<sup>89</sup> Hidayatullah Agus, *Alqur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemahan Per Kata*, (Bekasi : Cipta Bagus Segara, 2013), h. 107.



bertahap serta cenderung lambat (evolusi) yaitu melalui upaya pemberdayaan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam membangun masyarakat madani di di zaman modern ini, diantaranya:<sup>90</sup>

- a. Kenyataan adanya keragaman budaya yang merupakan dasar pengembangan identitas bangsa dan kebudayaan nasional.
- b. Pentingnya adanya saling pengertian antara sesama anggota masyarakat.
- c. Diperlukan suatu wadah kehidupan bersama yang diwarnai oleh adanya kepastian hukum. Tanpa kepastian hukum sifat-sifat toleransi dan saling pengertian antara sesama anggota masyarakat pasti tidak dapat diwujudkan.

#### **D. Konsep Madani dalam Peraturan Bupati No. 74 Tahun 2016**

##### **a. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Bupati No. 74 Tahun 2016**

Peraturan Bupati merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh bupati atas wewenangnya dalam daerah otonom terkait suatu hal demi kepentingan masyarakat dan secara tertulis. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peraturan Bupati merupakan suatu pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah Kabupaten untuk mengatur daerahnya sendiri.<sup>91</sup>

<sup>90</sup> Farid Wajdi Ibrahim, "Pembentukan Masyarakat Madani di Indonesia Melalui Civic Education", Jurnal Ilmiah Didaktika, Vol. 13, 1, (2012), h. 138.

<sup>91</sup> Djoko Prakoso, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 43.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan perundang-undangan tingkat daerah kabupaten atau disebut dengan Peraturan Bupati sekalipun tidak disebutkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan, namun tidak berarti keberadaan peraturan bupati/walikota tanpa alas hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011, yang berbunyi:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”<sup>92</sup>

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.<sup>93</sup>

## 2. Prinsip-Prinsip Masyarakat Madani

Diantara prinsip-prinsip masyarakat madani adalah:<sup>94</sup>

<sup>92</sup> Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011

<sup>93</sup> Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011

<sup>94</sup> Komarudin Hidayat, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006), h. 325.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. Demokratis

Demokratis menjadi penegakan wacana *civil society*, di mana dalam menjalani kehidupan, warga negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya, termasuk dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Demokratis berarti masyarakat dapat berlaku santun dalam pola hubungan interaksi dengan masyarakat sekitar dengan tidak mempertimbangkan suku, ras, dan budaya. Demokrasi merupakan salah satu syarat mutlak bagi penegakan *civil society*. Penegakan demokrasi di sini dapat mencakup sebagai bentuk aspek kehidupan seperti politik, social, budaya, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya.

#### b. Toleransi

Toleran merupakan sikap yang dikembangkan dalam *civil society* untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Toleransi ini memungkinkan akan adanya kesadaran masing-masing individu untuk menghargai dan menghormati pendapat kelompok masyarakat lain yang berbeda.

#### c. Pluralisme

Pluralisme adalah paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat dan memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut untuk tetap menjaga keunikan budayanya masing-masing. Pluralisme harus dipahami secara mengakar dengan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang menghargai dan menerima kemajemukan dalam konteks kehidupan sehari-hari.

d. Keadilan Sosial

Keadilan diterapkan untuk menjaga keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap masyarakat yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Secara esensial, masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah (penguasa).<sup>95</sup>

### 3. Madani dalam Peraturan Bupati No. 74 Tahun 2016

Terbitnya Peraturan Bupati No. 74 Tahun 2016, Bupati Agam Indra Catri mengenalkan Gerakan Nagari Madani di halaman Kantor Bupati Agam, yang merupakan suatu upaya pemerintah kabupaten (pemkab) Agam untuk mewujudkan kehidupan beragama dan beradat pada 82 Nagari di 16 kecamatan di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Secara sederhana, penerapan Gerakan Nagari Madani adalah upaya untuk lebih menggairahkan semangat “*baliak ka surau*” dan mewujudkan pemahaman “*Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah*” dapat tercapai.<sup>96</sup>

Di dalam Peraturan Bupati No. 74 Tahun 2016 tersebut dijelaskan bahwa madani adalah prinsip kehidupan mengandung nilai-nilai yang

<sup>95</sup> A. Ubaedillah, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education), Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), h. 149.

<sup>96</sup> <https://www.kabarsumbar.com/berita/nagari-madani-di-agam-resmi-diluncurkan/>  
Diakses pada tanggal 18 Juni 2021 pukul 06.41 WIB.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikembangkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan pemerintahan dan menata kehidupan masyarakat yang dijadikan sebagai nilai-nilai dasar kehidupan bermasyarakat yang didasarkan pada prinsip keadilan, musyawarah dan mufakat, nilai ukhuwah, memupuk rasa cinta tanah air dan pengakuan terhadap hak asasi setiap manusia.<sup>97</sup> Pengertian ini bisa dijadikan konsep terbentuknya Nagari Madani di Nagari Lawang.

Nagari Madani yang dijelaskan dalam Peraturan Bupati No. 74 Tahun 2016 dan juga diterapkan di Nagari Lawang adalah nagari yang religius/islami yang berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada nilai-nilai, norma- norma, hukum dan moral “Adat Basandi Syara’, Syara’ basandi Kitabullah, Syara’ mangato adat mamakai”, masyarakat yang berlandaskan ukhuwah islamiyah, menghormati perbedaan, bersikap demokratis dan terbuka (inklusif), gotong royong dan kekeluargaan.

Konsep Nagari Madani di nagari Lawang dapat dilihat dari Visi Misi Gerakan Nagari Madani yang telah disepakati Pemerintah Nagari Lawang. Adapun Visi Nagari Madani di Nagari Lawang adalah mewujudkan Nagari Lawang yang sejahtera, makmur dan madani. Adapun Misi Nagari Madani di Nagari Lawang adalah :

1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan transparan
2. Terwujudnya Peningkatan Ekonomi masyarakat yang merata
3. Terwujudnya Peningkatan Sumber Daya Manusia yang terarah dan berkesinambungan

<sup>97</sup> Peraturan Bupati Agam No. 74 Tahun 2016 Tentang *Pedoman Pelaksanaan Nagari Madani* Bab 1 Pasal 1 Poin 13.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Terwujudnya Peningkatan pembangunan insfrastruktur Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum Nagari
5. Terwujudnya Peningkatan Derajat dan Kualitas Kesehatan Masyarakat serta Penataan Lingkungan yang bersih dan sehat
6. Terjalannya kerjasama yang berkelanjutan dan bermanfaat dengan perantau dalam Pembangunan Nagari
7. Menanamkan Nilai-nilai Islami yang merupakan jati diri masyarakat yang telah mengakar pada perilaku kehidupan sehari-hari , sehingga Falsafah “ *Adat Basandi Syara’*, *Syara’ Basandi Kitabullah* “ dapat terwujud seperti yang diharapkan.<sup>98</sup>

#### 4. Struktur dan Isi Perbup No 74 Tahun 2016

Adapun Struktur dalam Penerapan Gerakan Nagari Madani Adalah bermula dari Bupati sebagai Pembuat peraturan, selanjutnya Peraturan itu disampaikan kepada setiap kecamatan dan Nagari dan untuk dilaksanakan di daerah masing-masing. Setiap tahun akan diberikan Penilaian dan evaluasi yang dilakukan oleh team evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati di 16 Kecamatan dan 82 Nagari yang ada di Kabupaten Agam.

Adapun isi Peraturan Bupati No 74 tahun 2016 terdiri dari VII Bab dan 15 Pasal.

Bab I Pasal 1 berisi tentang Ketentuan Umum, Bab II terdiri dari Pasal 2

<sup>98</sup> Sumber Data: *Dokumen Nagari Lawang Kecamatan Matur* 24 April 2020.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan 3 berisi tentang Maksud Dan Tujuan Nagari Madani, dan Pasal 4 yang berisi tentang Sasaran Gerakan Nagari Madani, Bab III berisi Penerapan Gerakan Nagari Madani Dengan Prinsip Baliak Ke Surau, terdiri dari Pasal 5 dan Pasal 6, Bab IV berisi tentang Evaluasi yang terdiri dari Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10, Bab V berisi tentang Pembinaan yang terdiri dari Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13, Bab VI berisi tentang Pembiayaan yang terdiri dari Pasal 14, Bab VII berisi tentang Ketentuan Penutup yang terdiri dari Pasal 15.<sup>99</sup>

<sup>99</sup> Peraturan Bupati Agam No. 59 Tahun 2009 Tentang *Pedoman Pelaksanaan Program Nagari Madani*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian tentang Nagari Madani di Nagari Lawang, Kec. Matur Kab. Agam, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan Perbup No. 74 Tahun 2016 di Nagari Lawang belum maksimal. Hal ini dikarenakan kurangnya keseriusan dari seluruh elemen yang tergabung dalam pelaksanaan Nagari Madani. Namun Pelaksanaan Sudah berjalan dengan berpedoman kepada panduan Perbup No. 74 Tahun 2106 yang dikeluarkan oleh Bupati Agam. Dalam *statement* aturan dari kabupaten sampai ke kecamatan dan sampai ke nagari tentu sudah dilakukan sosialisasi dan pembekalan, akan tetapi hal ini kurang sempurna dalam aplikasi di lapangan, baik pemerintah maupun tokoh-tokoh masyarakat yang lainnya.
2. Pelaksanaan Perbup No. 74 Tahun 2016 memiliki faktor yang mempengaruhi, hal ini dapat dilihat dari dua faktor :
  1. Faktor Pendukung
    - a. Beberapa lembaga pemerintah menyambut baik *euforia* gerakan nagari madani dan akan berusaha dalam hal sosialisasi maupun implementasi gerakan nagari madani di nagari
    - b. Adanya tokoh-tokoh seperti Niniak Mamak, alim ulama, cadiak pandai dan tokoh lainnya yang masing-masing mereka memiliki kompetensi yang berbeda-beda, maka dengan skill yang mereka

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki dapat menunjang terwujudnya Nagari Madani di Nagari Lawang.

- c. Adanya program-program unggulan pemerintah Kabupaten Agam seperti TPA Didikan Subuh yang sebelum ini sudah dijalankan secara baik di TPA-TPA yang ada di Nagari Lawang.
- d. Adanya aturan yang jelas dari pemerintah Kabupaten Agam tentang pedoman pelaksanaan Nagari Madani, yang mana masing-masing nagari tinggal menjalankan aturan yang telah ada.
- e. Adanya aturan adat, adat salingka nagari, adat sabana adat dan adat yang di adatkan, sebagai faktor pendukung terlaksananya Nagari Madani di Nagari Lawang
- f. Adanya anggaran atau dana dari pemerintah yang diberikan kepada nagari untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang penerapan nagari madani.

### 2. Faktor Penghambat

Adapun Faktor penghambat yang membuat pelaksanaan Nagari Madani di Nagari Lawang kurang terlaksana dengan baik adalah kurangnya keseriusan seluruh elemen masyarakat yang ada di Nagari Lawang, baik itu Pemerintah dan masyarakat serta seluruh tokoh yang ada di Nagari Lawang yang tidak memainkan peran dan kemampuannya dalam mewujudkan Nagari Madani. Sehingga dengan itu semua faktor pendukung yang ada tidak ada gunanya disebabkan kurangnya aplikasi dalam pelaksanaan aturan yang ada dan kurangnya



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keseriusan, dengan itu akan sulit terwujud Nagari Madani yang diinginkan.

3. Dari sisi Fiqh Siyasah Pelaksanaan Perbup No 74 Tahun 2016 telah sesuai dengan Prinsip bahwa “Kebijakan pemimpin atas rakyatnya dilakukan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.” Namun Belum Maksimal disebabkan karena Kurangnya Keseriusan dan juga usaha pemerintah, tokoh-tokoh Nagari Lawang, dan masyarakat dalam mewujudkan Nagari Madani. Hal ini sebagaimana digambarkan dalam kaidah fiqhiyah bahwa “Sesuatu yang banyak aktifitasnya, maka banyak pula keutamaanya”.

#### B. Saran

Keberhasilan pelaksanaan gerakan Nagari Madani di Nagari Lawang, tidak lepas dari komitmen kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta ditunjang dg usaha bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pemerintah Kecamatan hingga ke tingkat nagari, serta masyarakat yang ada di nagari tersebut. Adapun saran penulis setelah melakukan penelitian adalah:

1. Pemerintah dan Tokoh Adat serta Masyarakat sebagai Objek dalam mewujudkan Nagari Madani ini lebih serius dalam hal Implementasi demi mewujudkan Nagari madani di Nagari lawang, dengan lebih menunjukkan loyalitas dan bisa menjadi contoh bagi elemen masyarakat yang lain.
2. Lebih meningkatkan kesadaran tokoh-tokoh yang ahli dalam bidangnya untuk mewujudkan Nagari Madani sesuai dengan keahlian masing-masing. Serta meningkatkan aturan dan sanksi dari pemerintah nagari terhadap penyakit

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat yang masih meraja lela di Nagari Lawang sehingga dengan itu dapat terwujud Nagari yg Madani.

3. Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan dan tinjauan dari Fiqh Siyasah tentang Nagari Madani di Nagari Lawang. Untuk Peneliti selanjutnya dapat membahas poin lain yang dapat melihat perkembangan pergerakan Nagari Madani di Kab. Agam.



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adan, Hasanuddin Yusuf. “Eksistensi Kota Madani dalam Perspektif Siyash Syar’iyyah”, *Media Syariah*, Vol. 19, 2, (2017).
- Afiyadi, “Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari: Antara Format Adat atau Format Negara” *JURIS*, Vol. 9, 1, (2010).
- Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. “Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif Model dan Kriteria Pengukurannya”, *Jurnal Baca*, Vol. 1, 1, (2008).
- Al-Hadi, Zikri et., al, “Gerakan Nagari Madani: Berbasis Kebijakan Sosial Nilai Islam di Kabupaten Agam”, *Atlantis Press*, Vol. 458, 1, 2020.
- Al-Husaeni, Hamid. *Riwayat Kehidupan Nabi Besar Muhammad SAW*, Jakarta: Yayasan Al-Hamidy, 1992.
- Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Shulthaniyah*, Beirut: Daar al-Fikr, 1999.
- \_\_\_\_\_. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997.
- Al-Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Aniruddin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajawali Persada, 2003.
- Andiko, Toha. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah (Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer)*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- As, Sarmen, et., al, “Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Manggopoh di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam”, *JISIP*, Vol. 4, 2, (2015).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN SUSKA Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- As-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Azra, Azyumardi. *Surau Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi*, Jakarta: Gramedia Digital Nusantara, 2017.
- Bakry, H. Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Culla, Adi Suryadi. *Masyarakat Madani*, Jakarta: Rajawali Press, 1999.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Efendi, Taufik. *Modul Penguatan Pemangku Adat Minangkabau*, Padang: Dinas Kebudayaan Sumatera Barat, 2018.
- Fauzana, Rusyda. *Makna Nagari sebagai Representasi Sistem Desentralisasi Bagi Masyarakat Minangkabau*.
- Harisudin, M. Noor. *Pengantar Ilmu Fiqh*, Surabaya: Buku Pena Salasabila, 2013.
- Hidayat, Komarudin. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006.
- Hikam, Muhammad AS. *Demokrasi dan Civil Society*, Jakarta: LPES, 1996.
- <https://tafsirweb.com/2929-quran-surat-al-anfal-ayat-63>.
- <https://tafsirweb.com/1637-quran-surat-an-nisa-ayat-105.html>.
- <https://www.sumbarfokus.com/berita-4-tahun-nagari-madani-begini-perkembangan-pengamalan-absbk-di-masyarakat-agam-.html>
- Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'iy wa al-Ra'yati*, Mesir: Daar al-Fikr, 1998.
- Ibrahim, Duski . 2018. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*,. Palembang: CV. Amanah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ibnu al-Hakim, Farid Wajdi. "Pembentukan Masyarakat Madani di Indonesia Melalui *Civic Education*", *Jurnal Ilmiah Didaktika*, Vol. 13, 1, (2012), h. 138.
- Irwandi dan Novi Budiman, "Eksistensi Lembaga Unsur Alim Ulama (Pemberdayaan Kegiatan Keagamaan di Kenagarian)", *Al-Fuad*, Vol. 4, 1, (2020).
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- \_\_\_\_\_. *Fiqh Siyasah* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Quran dan Al-Hadits", *Al-Imarah*, Volume 3. No. 1, (2018).
- Khallaf, Syekh Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- Khallaf, Abdul Wahab. *al-Siyasah al-Syar'iyah au Nizham al-Daulah al-Islamiyah*, Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah, 1998.
- Kurdi, Abdurrahman Abdulkadir. *Tatanan Sosial Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Kurniawan, Feri, et., al, "Efektivitas Kepemimpinan Tungku Tigo Sajarangan dalam Pembangunan Nagari", *Ranah Research*, Vol.2, 2, (2020).
- Madjid, Nurcholish. *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- \_\_\_\_\_. *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Prenadamedia group, 2014.
- Mas'udi, Wawan. "Masyarakat Madani: Visi Etis Islam Tentang *Civil Society*", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 3, 2, (November 1999)
- Manan, Bagir. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan perundang-undangan Tingkat Daerah*, Bandung: LPPM Universitas Bandung, 1995.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Matta, Anis. "Dari Gerakan Ke Negara, Sebuah Rekonstruksi Negara Madinah Yang Dibangun Dari Bahan Dasar Sebuah Negara" Dalam majalah Suara Hidayatullah [www.suara.hidayatullah.com](http://www.suara.hidayatullah.com)., 12 Oktober 2012.

Moenawar, Chalil. *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Nama, Judul, Diakses pada \_\_\_\_\_ dari <https://ejournal.uin-suka.ac.id/isoshum/sosiologirefleksif/article/download/1157/1067>

Nama artikel dan Judul, Artikel diakses pada 18 Juni 2021 dari <https://www.kabarsumbang.com/berita/nagari-madani-di-agam-resmi-diluncurkan/>

Nama artikel dan judul, Artikel diakses pada 18 Juni 2021 dari <https://www.agamkab.go.id/Agamkab/detailberita/7273/bupati-agam--melalui-nagari-madani-kita-wujudkan-kehidupan-beragama-dan-beradat.html>

Nama artikel dan judul, Artikel diakses pada 18 Juni 2021 dari <https://www.agamkab.go.id/Agamkab/detailberita/7273/bupati-agam--melalui-nagari-madani-kita-wujudkan-kehidupan-beragama-dan-beradat.html>

Nama, Rukmana DW. *Masjid dan Dakwah, Merencanakan, Membangun dan Mengelola Masjid, Mengemas Substansi Dakwah, Upaya Pemecahan Krisis Moral dan Spritual*. Jakarta: Almarwardi Prima, 2002.

Noer, Syakiman M. *Indonesia Baru Menuju Masyarakat Madani*, Padang: Baitul Hikmah, 2000.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- NeHardi, "Hukum Syara' dan Fiqh Menurut Wahbah Az-Zuhaili", *Al-Hurriyah*, Volume. 12, 1, (2011).
- Peraturan Bupati No 74 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Nagari Madani.
- Prakoso, Djoko. *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Purungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Prima, Afdhal. "Sistem Pemerintahan Nagari" *Jom Fisip*, Vol. 1, 2, (2014).
- Rahardjo, M. Dawam. "Masyarakat Madani Indonesia", *Jurnal Paramadina*, Vol. 1, 2, (1999).
- \_\_\_\_\_. *Paradigma al-Qur'an Metodologi Tafsir dan Kritik Sosial*, Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005.
- Ranggawidjaja, Rosjidi. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1998.
- Reny Rawasita, et.al., *Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2009, hlm 60.
- Rohim, Mif. 2019. *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)*. Jombang Jawa Timur: Lppm Unhasy Tebuireng Jombang.
- Rozali, Abdullah. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sakdiah, “Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah”, *Al-Bayan*, Vol. 22, 33, (2016), h. 31.
- Sidiq, Gazalba, *Masjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: Pustaka Antara, 1971.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 05.
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyyah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Sjadjali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984.
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta : Mitra Wacana Media 2012.
- Soim, Muhammad. “Miniatur Masyarakat Madani (Perspektif Pengembangan Masyarakat Islam)”, *Jurnal Risalah*, Vol. 26, 1, (Maret 2015), h. 26.
- Suarjono, Muhammad. “Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, 19, (2014), h. 22.
- Suparto, Edi. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Suparno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres, 2011.
- Supoto, “Konsep Masyarakat Madani di Indonesia dalam Masa Postmodern (Sebuah Analisis Kritis), *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 5, 9, (2015).
- Syarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Syukur, Abdullah. *Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan"*, Ujung Pandang: Persadi, 1987.
- Ubaedillah, A. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education), Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Bandung: CV. Sinar Baru, 2002.
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Westa. *Psikologi Pengajaran*, Jakarta: Media Abadi, 1985.





## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO. 74 TAHUN 2016 TENTANG NAGARI MADANI DI NAGARI LAWANG KEC. MATUR KAB. AGAM MENURUT FIQH SIYASAH” Yang ditulis oleh :

Nama : **SYUKRIADI**  
NIM : 11720415220  
Program Studi : Hukum Tata Negara Siyasa

Telah di Munaqasyahkan Pada :

Hari/Tanggal : Senin/ 11 Oktober 2021  
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum  
Waktu : 13.00 WIB

Telah diperbaiki sesuai permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Oktober 2021

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Rahman Alwi, M.Ag**

Sekretaris  
**Dr. H. Zul Ikromi, Lc., M.Sy**

Penguji I  
**Mohammad Abdi Almaktsur, MA**

Penguji II  
**Kamiruddin, M.Ag**

**Mengetahui**  
**Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni**  
**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jalinus, S.Ag**  
**NIP. 19750801 200701 1 023**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## HASIL WAWANCARA DENGAN TOKOH-TOKOH DI NAGARI LAWANG KECAMATAN MATUR

**Nama** : Sevenday S.Ag Khatib Mantari  
**Jabatan** : Tokoh Ulama Nagari Lawang  
**Tanggal Wawancara** : Tanggal 2 Juni 2021  
**Waktu Wawancara** : Pukul 10.30 WIB  
**Tempat Wawancara** : Kampuang Santri

1. Se jauh mana bapak mengetahui tentang Perbup No. 74 Tahun 2016 tersebut dan bagaimana pandangan bapak terhadap Perbup tersebut?

Perbup No. 74 Tahun 2016 tentang penerapan Nagari Madani di Nagari Lawang, Kec. Matur Kab. Agam merupakan suatu peraturan daerah unggulan di Kab. Agam. Salah satunya Nagari Lawang ditunjuk sebagai Pilot Project penerapan Nagari Madani di Kab. Agam.

Nagari Lawang sebagai bagian dari salah satu Nagari yang ada di Kabupaten Agam, menjadikan Undang-Undang yang ditetapkan Pemerintah kabupaten menjadi pedoman untuk terlaksananya Nagari Madani di Nagari Lawang, tentunya demi menjalankan Undang-Undang ini di Nagari Lawang, pemerintah dan masyarakat mengetahui hakikat Nagari Madani itu Sendiri.

2. Siapakah yang berperan penting dalam pelaksanaan Perbup ini untuk mewujudkan masyarakat madani di Nagari Lawang?

Adapun yang berperan penting dalam mewujudkan perda ini di Nagari Lawang, jika dilihat dari kehidupan bermasyarakat tentu seluruh elemen masyarakat berperan penting. Namun yang paling menjadi tokoh utama atau stakeholder yang paling penting adalah ulama. Jika ulama tidak bergerak langsung secara nyata dalam penerapan mustahil masyarakat madani di Nagari Lawang akan tercapai.

Peran dan fungsi ulama dalam nagari menduduki posisi yang strategis. Ulama sebagai *suluh bendang dalam nagari* yaitu ulama sebagai wadah utama yang mendorong masyarakat untuk melaksanakan program-program di nagari, terutama dalam bidang keagamaan.

1. Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
  - a. Dilarang mengutip atau selang seling atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Nama**

**: Fauzi Dt. Sutan Batuah**

**Jabatan**

**: Tokoh Muda Nagari Lawang**

**Tanggal Wawancara**

**: Tanggal 10 Juni 2021**

**Waktu Wawancara**

**: Pukul 13.00 WIB**

**Tempat Wawancara**

**: Rumah Narasumber**

1. Bagaimana implementasi atau penerapan Perbup tersebut di Nagari Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam?

Dilihat dari konsep yang diimplementasikan dalam kebijakan nagari madani Perbup No. 74 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nagari Madani di Nagari Lawang sudah diterapkan, namun belum mencapai 70%, hal ini dilihat dari segi keseriusan seluruh elemen masyarakat dan tokoh-tokoh nagari untuk betul-betul menerapkan perda ini.

Salah satu contohnya dari segi aplikasi di lapangan, ibarat kita di Minangkabau membawa masyarakat akan payah jika kita tidak terjun langsung sesuai apa yang kita perintahkan. Ibarat memandikan kuda, kita yang dulu masuk baru kuda akan ikut masuk, peraturan tinggal peraturan, terkadang statement setelah disosialisasikan justru yang bertanggung jawab dalam mengeluarkan aturan tersebut kurang mengaplikasikannya secara langsung di lapangan, sehingga pelaksanaannya menjadi kurang maksimal. Disini terlihat bahwa penyebab dari kurang maksimalnya pelaksanaan perbup ini tentunya berasal dari objek dan subjek pelaksanaan nagari madani ini

2. Apakah dampak adanya Perbup ini terhadap pelaksanaan nagari madani di Nagari Lawang?

Dampak adanya perda ini terhadap pelaksanaan nagari madani di nagari lawang terutama dalam kehidupan beragama, yang mana kehidupan beragama ini akan mempengaruhi kehidupan lain seperti ekonomi, sosial, budaya, pertanian, perdagangan. Karna kalau bicara madani cakupan nya cukup besar yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat. Karna kurangnya keseriusan masyarakat dan elemen-elemen yg tergabung dalam nagari Madani dalam menerapkan Nagari Madani sehingga mempengaruhi aspek-aspek kehidupan lain dalam masyarakat. Contoh masjid dibulan ramadhan sangat ramai dipenuhi masyarakat untuk ibadah, tapi setelah ramadhan berakhir justru masjid kembali sepi diisi oleh beberapa orang saja. Contoh lain dalam

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





acara peringatan hari besar islam sering dilaksanakn tabligh akbar, tapi ketika waktu adzan masuk masyarakat yang ikut tabligh akbar justru pulang kerumah tanpa terlebih dahulu melaksanakan shalat berjama'ah di masjid tempat dilaksanakannya tabligh akbar.

**Nama**  
**Jabatan**

**Tanggal Wawancara**

**Waktu Wawancara**

**Tempat Wawancara**

**: E. Dt. Bagindo Marajo**

**: Niniak Mamak Nagari Lawang**

**: Tanggal 15 Juni 2021**

**: Pukul 15.00 WIB**

**: Rumah Narasumber**

1. Apa yang menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan Perbup No. 74 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nagari Madani di Nagari Lawang?

Penyebab dari kurang maksimalnya pelaksanaan Perbup ini adalah karena penggunaan masjid tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Masyarakat masih belum memaksimalkan fungsi masjid. *Penggunaan masjid di nagari ini ibarat pepatah: "jauah panggang dari api, jauh lenggang dari pado katiak"*. Maksudnya, sesuatu yang diharapkan tidak sesuai dengan maksud dan tujuannya. Dalam hal ini sangat dibutuhkan peran ulama dan tokoh masyarakat untuk menggerakkan masyarakat agar bisa memaksimalkan fungsi masjid.

2. Apa faktor yang mempengaruhi Penerapan Nagari Madani di Nagari Lawang?

Dalam hal penerapan nagari madani khususnya di Nagari Lawang tak lepas dari dukungan tokoh yang lain seperti istilah dalam adat minang "Tungku Tigo Sajarangan" (Tokoh Adat, Pemerintah, dan Ulama), jika 3 ini tidak sejalan ibarat petuah adat "Tali Tigo Sapilin" yang harus satu dalam mewujudkan segala sesuatu dalam Nagari maka tidak akan pernah terwujud yang namanya Nagari Madani.

Faktor yang mempengaruhi penerapan nagari madani khususnya Nagari Lawang adalah adanya aturan lain yang mendukung terlaksananya perda ini baik aturan tertulis maupun tidak tertulis. Misalnya aturan adat, adat salangka nagari, adat sabana adat dan adat yang di adatkan. Selain itu dengan adanya Evaluasi tahunan dari team Kabupaten, maka ini bisa jadi faktor pendukung untuk semakin baiknya pelaksanaan Nagari Madani di Nagari Lawang.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Nama**

**Jabatan**

**Tanggal Wawancara**

**Waktu Wawancara**

**Tempat Wawancara**

: Jamal Dt. Lelo Ameh

: Tokoh Masyarakat Nagari Lawang

: Tanggal 15 Juni 2021

: Pukul 15.00 WIB

: Kantor Kerapatan Adat Nagari Lawang Kecamatan Matur

1. Apa yang menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan Perbup No. 74 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nagari Madani di Nagari Lawang?

Dalam program unggulan nagari seperti TPA didikan subuh yang merupakan program utama nagari yang pesertanya bukan hanya anak-anak, akan tetapi ada pimpinan, termasuk juga tokoh masyarakat. Pemahaman yang berkembang selama ini bahwa didikan subuh hanya dilakukan oleh anak-anak dari setelah melakukan shalat subuh berjamaah di masjid. Akan tetapi, orang tua dan masyarakat sekitar juga harus ikut serta dan mendampingi anak-anaknya untuk didikan subuh. Jadi, ini juga tergantung kepada tokoh masyarakat untuk menggerakkan terlaksananya kegiatan non formal ini dengan baik. Karena kegiatan tersebut sangat mendukung agar telaksananya nagari madani di Nagari Lawang.

2. Apa manfaat Perbup No. 74 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nagari Madani ini dan apa saran bapak untuk terwujudnya Nagari Madani di Nagari Lawang?

Manfaat Perbup No. 74 tahun 2016 ini sangat bagus jika benar-benar diterapkan dan dilaksanakan dengan serius oleh semua elemen, dengan itu maka akan tercipta nagari madani yang diharapkan.

Adapun saran untuk pelaksanaan Perbup ini di Nagari adalah mari kita seayun selangkah agar apa yang diharapkan diikiuti dan sama-sama dilaksanakan, masukan kepada pemerintah dan elemen masyarakat untuk lebih memahami makna madani seutuhnya, yang mana madani itu adalah asal kata Madinah yang berarti pancaran. Yang menjadikan agama sebagai pancaran dalam melaksanakan aktifitas hidup sehari-hari. Lebih mementapkan toleransi dalam kehidupan, karna masih banyak di nagari lawang saling diskriminasi dalam hal agama, kalau ulama ini paham nya ini tidak usah diikuti, masalah khilafiyah yang masyarakat masih permasalahan dalam kehidupan beragama. Contoh ajaran muhammadiyah dan NU, masalah bismillah jahar dan sir dll. Hal ini

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menjadi salah satu alasan belum tampak pancaran hidup yang madani dengan adanya masyarakat yang toleransi dan tidak saling berdampingan dengan masyarakat lain yang berbeda paham.

### 1. Nama

: A. Dt. Pangulu Sutan

### 2. Jabatan

: Tokoh Cadiak Pandai Nagari Lawang

### 3. Tanggal Wawancara

: Tanggal 19 Juni 2021

### 4. Waktu Wawancara

: Pukul 09.00 WIB

### 5. Tempat Wawancara

: Kantor Kerapatan Adat Nagari Lawang

### 1. Apa kekuatan dari Perbup tersebut?

Adapun yang menjadi kekuatan dalam Perda No 74 Tahun 2016 adalah kekuatan Hukum dari Perda itu sendiri, yang mana Pemerintah tentu sudah dengan matang menetapkan aturan dan dasar hukum yang harus dilaksanakan dan terapkan dalam mewujudkan Nagari madani di Nagari Lawang seperti yang telah dicontohkan Nabi Muhammad dalam membangun Masyarakat Madinah. Kekuatan ini terlepas dari Undang-Undang yang berlaku di daerah setempat khusus di Nagari Lawang.

### 2. Apa kelemahan dari Perbup tersebut?

Perda No. 74 Tahun 2016 ini memiliki sisi kelemahan dalam aplikasi ataupun implementasi dari pemerintah dan juga masyarakat yang menjalankan aturan tersebut dan lebih khususnya lagi dalam kehidupan beragama masyarakat Nagari Lawang. Namanya aturan yang dibuat oleh manusia sudah pasti memiliki sisi kelemahan dan kekurangan. Sepanjang saya melaksanakan da'wah di berbagai tempat di Nagari Lawang, Perda No 74 Tahun 2016 ini kurang tersosialisasi pada seluruh elemen masyarakat dalam aplikasi dan implementasinya.

Penyebab dari kurang maksimalnya pelaksanaan Perda No. 74 Tahun 2016 adalah karena kurang tersosialisasikannya perda ini kepada masyarakat. Dalam *statement* aturan dari kabupaten sampai ke kecamatan dan sampai ke nagari tentu sudah dilakukan sosialisasi dan pembekalan, akan tetapi hal ini kurang sempurna dalam aplikasi di lapangan, baik pemerintah maupun tokoh-tokoh masyarakat yang lainnya.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta dilindungi Undang-undang**  
**Jabatan**  
**Tanggal Wawancara**  
**Waktu Wawancara**  
**Tempat Wawancara**

: Bayu Sakti Pribadi  
 : Kepala Jorong di Nagari Lawang  
 : Tanggal 19 Juni 2021  
 : Pukul 09.00 WIB.  
 : Kantor Kerapatan Adat Nagari Lawang

1. Bagaimana keadaan Nagari Lawang, baik masyarakat, pemerintah, maupun program-program yang ada sebelum dan sesudah keluarnya Perbup No. 74 Tahun 2016 tentang pelaksanaan nagari madani ini?

Keadaan sebelum dan sesudah keluarnya Perda No. 74 Tahun 2016 Tentang Nagari Madani di Nagari Lawang itu sama saja. Jika dilihat jauh ke belakang lebih hebat, masyarakat senang untuk datang ke surau, bersama-sama meramaikan masjid. Tapi yang sekarang terjadi dengan adanya perubahan zaman dan canggihnya teknologi semua berubah dan masyarakat sibuk dengan gadget dan kegiatan-kegiatan lain sehingga kehidupan beragama tidak sekuat masa lalu.

Jauh sebelum keluarnya Perda ini masyarakat di Nagari Lawang mudah untuk melaksanakan kegiatan yang berorientasi pada keislaman seperti meramaikan masjid dengan cara melaksanakan shalat jamaah di masjid dan senang mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan di dalamnya. Sedangkan pada saat keluarnya maupun sesudah keluarnya Perda tersebut, zaman sudah mulai mengalami perubahan dan teknologi juga semakin canggih yang bisa membuat masyarakat lupa diri jika tidak bisa mengontrol diri dengan baik. Hal inilah yang membuat kehidupan beragama di masa sekarang tidak sekuat masa lalu.

2. Apa faktor yang mempengaruhi Penerapan Nagari Madani di Nagari Lawang?

Faktor yang mempengaruhi terlaksananya gerakan nagari madani adalah adanya anggaran atau dana dari pemerintah dalam mewujudkan nagari madani, apalagi Nagari Lawang ditunjuk sebagai pilot project nagari madani di Kabupaten Agam. Anggaran dari pemerintah tersebut tentunya digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong terlaksananya nagari madani.

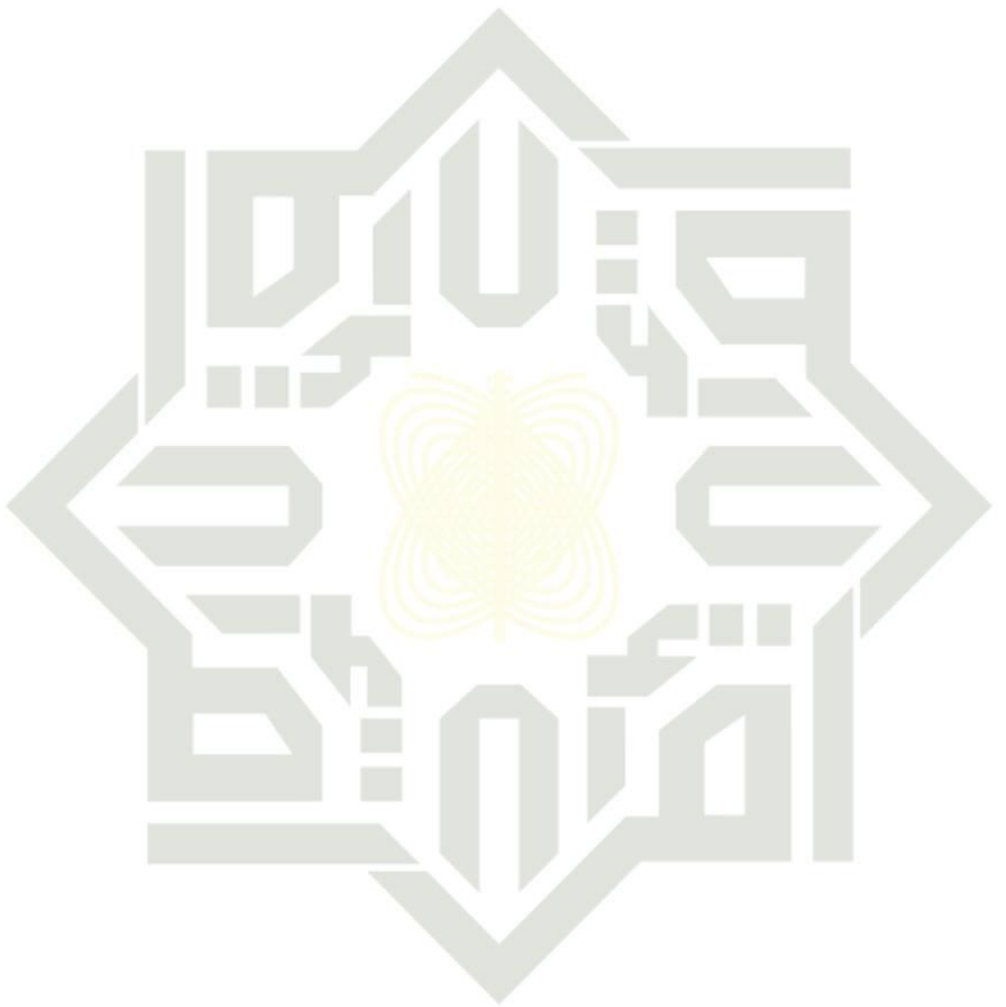
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Diantara kegiatan yang dapat mendorong terlaksananya nagari madani misalnya mengadakan kegiatan untuk memperingati hari besar Islam hingga mengadakan kerkakarnya yang berhubungan dengan program-program berbasis keagamaan di nagari. Anggaran dari pemerintah tersebut juga bisa digunakan untuk pembangunan ataupun perencanaan rumah ibadah di nagari. Maka dari itu, dukungan dari pemerintah juga sangat diperlukan sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat dan apresiasi untuk program-program yang dicanangkan di nagari untuk mewujudkan nagari madani.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
Tidak Dilibatkan dalam Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

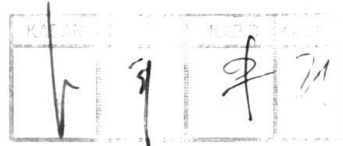


BUPATI AGAM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN BUPATI AGAM  
NOMOR 74 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN NAGARI MADANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menuju Nagari Madani sesuai dengan arah kebijakan umum Daerah Kabupaten Agam yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016-2021 perlu dilaksanakan program Gerakan Nagari Madani secara terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, perlu adanya suatu Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nagari Madani yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Agam.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);







- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2007 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN NAGARI MADANI

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Agam;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam;
3. Bupati adalah Bupati Agam;
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan.





- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
6. Pemerintah Nagari adalah Walinagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari;
7. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Jorong adalah bagian dari wilayah Nagari;
9. Badan Permusyawaratan Nagari selanjutnya disingkat BAMUS Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
10. Lembaga Kemasyarakatan Nagari adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Nagari dalam memberdayakan masyarakat;
11. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN adalah Lembaga Permusyawaratan dan Pemufakatan adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat di tengah-tengah masyarakat nagari;
12. Masyarakat Nagari adalah setiap individu baik secara pribadi maupun dalam kehidupan keluarga, suku atau kaum, kelompok, organisasi dan kelembagaan dari satu nagari dan yang memiliki keterikatan dan tanggung jawab dalam pembangunan dan memajukan nagari;
13. Madani adalah prinsip kehidupan mengandung nilai-nilai yang dikembangkan oleh Nabi Muhammad Salallahu 'Alaihi Wasallam dalam menjalankan pemerintahan dan menata kehidupan masyarakat yang dijadikan sebagai nilai-nilai dasar kehidupan bermasyarakat yang didasarkan pada prinsip keadilan, musyawarah dan mufakat, nilai ukhuwah, memupuk rasa cinta tanah air dan pengakuan terhadap hak azasi setiap manusia;
14. Nagari Madani adalah nagari yang religious/islami, yang berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada nilai-nilai, norma-norma, hukum dan moral Adat basandi syarak, sayarak basandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai. Masyarakat yang berlandaskan ukhuwwah islamiyyah, menghormati perbedaan, bersikap demokratis dan terbuka (inklusif), gotong royong dan kekeluargaan.
15. Niniak Mamak adalah seseorang yang diangkat dalam suatu kaum untuk membawakan gelar sako dan telah diakui oleh nagari;
16. Instrumen Gerakan Nagari Madani adalah alat ukur yang digunakan untuk menentukan status/level tertentu nagari berdasarkan capaian dari Gerakan Nagari Madani;





- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

Maksud Gerakan Nagari Madani adalah untuk mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABS-SBK) guna mewujudkan karakter masyarakat yang madani.

### Pasal 3

Tujuan Gerakan Nagari Madani adalah :

- a. Optimalisasi pendidikan informal terutama Al-qur'an (baca, pahami, amalkan, hafal);
- b. Peningkatan peranan Masjid/surau sebagai sentra kehidupan sosial masyarakat;
- c. Pelaksanaan perlindungan atas kampung dan masyarakat nagari;
- d. Peningkatan rasa kepedulian sosial, ukhuwah islamiyah, kekeluargaan dan gotong royong;
- e. Penerapan adat, seni budaya dan olah raga yang sesuai dengan filosofi adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABS-SBK);
- f. Peningkatan peran serta lembaga dan organisasi masyarakat; dan
- g. Peningkatan kesalehan individu dan sosial;

### Pasal 4

Sasaran Gerakan Nagari Madani adalah:

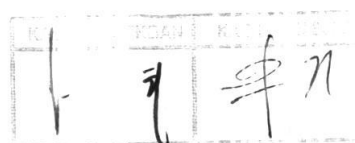
- a. Pemerintahan Nagari; dan
- b. Masyarakat Nagari;

## BAB III PENERAPAN GERAKAN NAGARI MADANI

### Pasal 5

Penerapan Gerakan Nagari Madani dengan prinsip Baliak ka Surau dalam pengertian:

- a. Fisik/zahir. Seluruh masjid/surau/mushalla yang ada di nagari-nagari kembali ramai dan diramaikan dengan semua fungsi masjid sebagai sentra kehidupan sosial masyarakat, baik sebagai pusat ibadah, pendidikan dan dakwah, sosial keagamaan, sosial ekonomi dll ; dan
- b. Menghidupkan kembali substansi pendidikan surau sebagai muatan pendidikan karakter anak nagari secara terpadu dan berkesinambungan:
  1. Olah hati (kecerdasan spritual), menanamkan keimanan, ketaqwaan, interaksi yang utuh dengan kitabullah/al-qur'an, akhlaqul karimah, kejujuran, integritas dll.
  2. Olah rasa (cerdas emosional dan sosial), mendidik sisi sensitivitas, apresiativitas, kematangan emosi/jiwa, toleran, sopan dan ramah,







- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan sosial, kepedulian dan menjadi insan yang bermanfaat bagi orang lain.

3. Olah fikir (cerdas intelektual), insan intelektual yang cerdas, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, imajinatif, berfikir terbuka yang objektif.
4. Olah raga dan rasa (cerdas kinestetis), membentuk generasi yang sehat, bugar, berdaya tahan, sigap, terampil, tangguh, bersahabat, sportif, disiplin, kompetitif, koperatif dan ceria.

#### Pasal 6

Strategi untuk mewujudkan :

- a. Optimalisasi pendidikan informal terutama Al-qur'an dilakukan melalui :
  1. Pengurangan buta baca tulis Al-quran;
  2. Peningkatan jumlah penghafal Al-quran;
  3. Tersedianya rumah quran/rumah tahfidz;
  4. Terlaksananya Maghrib Mengaji;
  5. Terlaksananya khatam quran/MTQ di nagari; dan
  6. Tercapainya APK (Angka Partisipasi Kasar) pada tingkatan TPA/MDA;
- b. Peningkatan peranan Masjid/Surau sebagai sentra kehidupan sosial masyarakat dilakukan melalui:
  1. Terlaksananya shalat 5 waktu berjamaah di masjid/surau;
  2. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana TPQ/TPA/MDA (tersedianya guru tetap, guru yang sudah mendapatkan pelatihan, memenuhi kurikulum standar dan memiliki guru dengan kompetensi A (berdasarkan klasifikasi dari Kemenag Kabupaten Agam));
  3. Penyelenggaraan peringatan Hari Besar Islam;
  4. Penyelenggaraan kegiatan Remaja Masjid/Surau dan Didikan Subuh (Masjid/Surau Nagari);
  5. Penyelenggaraan kegiatan Majelis Ta'lim;
  6. Penyelenggaraan pemberdayaan sosial keagamaan (melalui pemberian santunan kepada fakir, miskin, yatim) di Masjid/Surau;
  7. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan sosial ekonomi (Unit Pengumpul Zakat (UPZ), koperasi syariah, Badan Mal Wattamwil (BMT), dll) di Masjid/Surau;
  8. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung akses air bersih, sanitasi, akses jalan dan penerangan menuju masjid dengan kondisi baik dan pustaka Masjid/Surau; dan
  9. Pembentukan kepengurusan Masjid/Surau yang lengkap dan memiliki rencana kegiatan tahunan;
- c. Pelaksanaan perlindungan atas kampung dan masyarakat nagari dilakukan melalui :
  1. Penurunan kasus penyalahgunaan narkoba;
  2. Pengawasan terhadap peredaran minuman keras;
  3. Penurunan kasus pergaulan bebas/asusila/pornografi/pornoaksi;
  4. Penurunan kasus perjudian; dan
  5. Penurunan tingkat kriminalitas;





- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

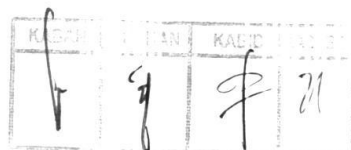
- d. Peningkatan rasa kepedulian sosial ukhuwah islamiyah, kekeluargaan dan gotong royong dilakukan melalui :
  1. Penurunan angka perceraian;
  2. Penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga dan Kekerasan pada anak;
  3. Pengembangan sikap gotong royong;
  4. Penurunan angka anak putus sekolah karena faktor ekonomi;
  5. Penurunan jumlah keluarga miskin;
  6. Pengembangan kegiatan atau forum yang meningkatkan persaudaraan dalam nagari; dan
  7. Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat rantau;
- e. Penerapan adat, seni budaya dan olah raga yang sesuai dengan filosofi adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABS-SBK) dilakukan melalui :
  1. Peningkatan eksistensi ninik mamak;
  2. Peningkatan kapasitas ninik mamak;
  3. Peningkatan kapasitas ampek jinih/imam khatik suku;
  4. Pengembangan program/kegiatan seni budaya yang sesuai adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah; dan
  5. Pengembangan program/kegiatan olah raga masyarakat yang tidak bertentangan dengan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah;
- f. Peningkatan peran serta lembaga dan organisasi masyarakat dilakukan melalui:
  1. Peningkatan peran serta KAN;
  2. Peningkatan peran serta Majelis Ulama Indonesia Nagari;
  3. Peningkatan peran serta Bundo Kanduang dan Organisasi Kewanitaan;
  4. Peningkatan peran serta Organisasi Kepemudaan; dan
  5. Peningkatan peran serta Organisasi Keagamaan;
- g. Peningkatan kesalehan individu dan sosial dilakukan melalui :
  1. Peningkatan jumlah jamaah shalat subuh;
  2. Peningkatan jumlah pemotongan hewan qurban;
  3. Peningkatan jumlah Zakat Infak dan Sedekah;
  4. Pengembangan budaya berpakaian sesuai syariat agama;
  5. Pembangunan simbol-simbol keislaman; dan
  6. Pengembangan lingkungan bersih atas partisipasi warga;

#### BAB IV EVALUASI Pasal 7

Pemerintah daerah melakukan evaluasi Gerakan Nagari Madani setiap tahun.

#### Pasal 8

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berdasarkan Instrumen Gerakan Nagari Madani.





- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Instrumen Gerakan Nagari Madani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

Evaluasi Gerakan Nagari Madani dilaksanakan oleh Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Tim Evaluasi bertugas menganalisa dan menilai pelaksanaan Gerakan Nagari Madani.
- (2) Hasil Penilaian Tim dituangkan dalam bentuk skor per indikator
- (3) Akumulasi skor indikator per nagari dikelompokkan sebagai berikut :
  - a. Nilai 0 sampai dengan 85 dikategorikan sebagai Nagari Madani Level I;
  - b. Nilai 86 sampai dengan 110 dikategorikan sebagai Nagari Madani Level II;
  - c. Nilai 111 sampai dengan 130 dikategorikan sebagai Nagari Madani Level III;
  - d. Nilai 131 sampai dengan 170 dikategorikan sebagai Nagari Madani Level IV; dan
  - e. Nilai 171 sampai dengan 215 dikategorikan sebagai Nagari Madani Level V;

### BAB V

### PEMBINAAN

#### Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan Pemerintah Nagari memprogramkan kegiatan untuk mendukung terlaksananya Gerakan Nagari Madani.
- (2) Nagari dengan peningkatan nilai tertinggi setiap tahunnya akan diberikan reward/penghargaan atau bantuan keuangan bersifat khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (3) Nagari yang tidak ada peningkatan atau penurunan nilai setiap tahunnya, akan dilakukan pengurangan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

#### Pasal 12

- (1) Pembinaan Gerakan Nagari Madani dilaksanakan oleh Tim Pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus melakukan pembinaan teknis sesuai tugas dan fungsi dengan mempedomani kriteria dan indikator pengukuran nagari madani.







- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Pasal 13

Dalam rangka pembinaan Gerakan Nagari Madani setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Agam yang beragama Islam harus menjadi jamaah tetap/Pengurus Masjid/Surau yang terdekat dengan tempat tinggal yang bersangkutan.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 14

Pembiayaan untuk pelaksanaan Gerakan Nagari Madani dibebankan kepada:

- a. APBD Kabupaten Agam;
- b. APB Nagari; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 29 Desember 2016

BUPATI AGAM

INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung,  
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2016 NOMOR 74



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 74 TAHUN 2016

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN

NAGARI MADANI

Instrumen Pengukuran Nagari Madani

No	Kriteria	Indikator	Deskriptor	Skor per indikator	Skor per kriteria
1	Optimalisasi pendidikan informal terutama Al-qur'an	1 Pengurangan buta baca tulis Al-quran.	Tidak ada data/ terjadi peningkatan	0	
			Ada data tapi tidak terjadi pengurangan	3	
			Ada pengurangan dibanding tahun sebelumnya	5	
		2 Peningkatan jumlah penghafal Al-quran.	Tidak ada data/ terjadi penurunan	0	
			Ada data tapi tidak terjadi peningkatan	3	
			Ada peningkatan dibanding tahun sebelumnya	5	
		3 Tersedianya Rumah quran/ rumah tahfidz	Tidak ada	0	
			Ada tapi tidak berkembang	3	
			Ada, berkembang baik, didukung dokumentasi	5	
		4 Terlaksananya Maghrib mengaji	Tidak ada	0	
			Ada tapi hanya diikuti sebagian kecil warga (objek observasi Masjid)	3	
			Ada, berkembang baik, didukung penghentian aktifitas sosial lain selama magrib mengaji di Masjid	5	
		5 Terlaksananya khatam quran/MTQ di nagari	Tidak ada	0	
			Ada, Terjadwal periodik, dilaksanakan hanya di tingkat Nagari, tidak berjenjang	3	
			Ada, Terjadwal periodik, dilaksanakan berjenjang	5	

KAPALAN

7

7

7

- 
- A close-up photograph of a handwritten signature 'J. P.' in blue ink on a lined notepad. The signature is written in a cursive style. The notepad has horizontal lines and a vertical margin line on the left. The background is a plain, light-colored surface.

No	Kriteria	Indikator	Deskriptor	Skor per indikator	Skor per kriteria
	6	<b>Tercapainya APK (angka partisipasi kasar) TPA/MDA</b> dihitung dengan jumlah siswa TPA MDA di nagari / jumlah anak usia TPA MDA X 100%)	Kurang dari 25%	1	
			APK: 26% - 49%	2	
			APK: 50% - 74%	3	
			APK: 75% - 84%	4	
			APK: Lebih sama dengan 85%	5	
2	<b>Peningkatan peranan Masjid/Surau sebagai sentra kehidupan sosial masyarakat</b>	<b>1 Terlaksananya shalat 5 waktu berjamaah</b>	Tidak semua Masjid/Surau menyelenggarakan shalat 5 waktu berjamaah	1	
			Semua Masjid/Surau menyelenggarakan shalat 5 waktu berjamaah, namun jamaahnya kurang dari 50% dari jumlah penduduk.	3	
			Semua Masjid/Surau menyelenggarakan shalat 5 waktu berjamaah, jamaahnya lebih dari 50% dari jumlah penduduk.	5	
			Kurang dari 25%	1	
			26% - 49%	2	
	2	<b>Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana TPQ/TPA/MDA</b> Didukung dengan kelengkapan unsur berikut: 1. Ada guru tetap, 2. Ada Guru yang telah mendapatkan pelatihan, 3. Memiliki Kurikulum sesuai standar Kemenag, 4. Memiliki Guru dengan Kompetensi A (berdasarkan klasifikasi dari Kemenag Kabupaten Agam)	50% - 74%	3	
			75% - 84%	4	
			Lebih sama dengan 85%	5	
			Tidak Ada Peringatan HBI di Masjid	1	
			Ada Peringatan HBI, namun tidak terjadwal sistematis	3	
	3	<b>Penyelenggaraan peringatan HBI</b>	Ada Peringatan HBI, terjadwal sistematis didukung dengan dokumentasi	5	



-

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Kriteria	Indikator	Deskriptor	Skor per indikator	Skor per kriteria
3	Pelaksanaan perlindungan atas kampung dan masyarakat nagari	8 Peningkatan sarana dan prasarana pendukung akses air bersih, sanitasi, akses jalan dan penerangan menuju masjid dengan kondisi baik dan pustaka Masjid/Surau	Kurang dari 25%	1	
			26% - 49%	2	
			50% - 74%	3	
			75% - 84%	4	
			Lebih sama dengan 85%	5	
		9 Pembentukan kepengurusan Masjid/Surau yang lengkap dan memiliki rencana kegiatan tahunan	Kurang dari 25%	1	
			APK: 26% - 49%	2	
			APK: 50% - 74%	3	
			APK: 75% - 84%	4	
			APK Lebih sama dengan 85%	5	
		1 Penurunan kasus penyalahgunaan narkoba	Terjadi Peningkatan Kasus Narkoba di dalam Nagari dalam 1 tahu berjalan	0	
			Terjadi Penurunan kasus Narkoba di dalam Nagari dalam 1 tahu berjalan	3	
			Tidak ada kasus Narkoba dalam Nagari dalam 1 tahun berjalan	5	
		2 Pengawasan terhadap peredaran	Adanya orang yang menjual minuman keras dalam nagari	0	
			Tidak ada pihak yang menjual minuman keras dalam nagari	5	
			Terjadi Peningkatan kasus asusila/pornografi/pornoaksi dalam Nagari dalam satu tahun berjalan	0	
			Terjadi Penurunan Kasus asusila/pornografi/pornoaksi dalam Nagari dalam satu tahun berjalan	3	
			Tida ada kejadian asusila/pornografi/pornoaksi dalam Nagari dalam satu tahun berjalan	5	
		4 Penurunan kasus perjudian	Terdapat tempat/ sarana perjudian dalam Nagari pada tahun berjalan	0	
			Tidak ada tempat/ sarana perjudian dalam Nagari pada tahun berjalan	5	

KABANG

SEKRETERARJ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Kriteria	Indikator	Deskriptor	Skor per indikator	Skor per kriteria
4	Peningkatan rasa kepedulian sosial ukhuwah islamiyah, kekeluargaan dan gotong royong	5 Penurunan tingkat kriminalitas;	Terjadi Peningkatan kasus kriminal dalam Nagari dalam satu tahun berjalan	0	
			Terjadi Penurunan Kasus kriminal dalam Nagari dalam satu tahun berjalan	3	
			Tida ada kejadian kriminal dalam Nagari dalam satu tahun berjalan	5	
			Terjadi Peningkatan Perceraian dalam Nagari pada tahun berjalan	0	
			Terjadi Penurunan kasus Perceraian dalam Nagari pada tahun berjalan	3	
		1 Penurunan angka perceraian	Tidak ada kasus Perceraian dalam Nagari pada tahun berjalan	5	
			Terjadi Peningkatan Kasus KDRT dalam Nagari pada tahun berjalan	0	
			Terjadi Penurunan Kasus KDRT dalam Nagari pada tahun berjalan	3	
			Tidak ada kasus KDRT dalam Nagari pada tahun berjalan	5	
			Ada tapi tidak rutin	1	
		3 Pengembangan sikap gotong royong	Ada, rutin, namun tidak terdokumentasi	3	
			Ada, rutin dengan dokumentasi baik	4	
			Ada, rutin, ditambah antusias dan ada peningkatan dengan dokumentasi baik	5	
			Ada data anak putus sekolah karena faktor ekonomi	1	
			Ada upaya terprogram mengurangi anak putus sekolah karena faktor ekonomi namun hasil belum terlihat	3	
		4 Penurunan angka anak putus sekolah karena faktor ekonomi	Ada upaya terprogram mengurangi anak putus sekolah karena faktor ekonomi dan hasil sudah terlihat	5	

1

2

3

4

5



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Kriteria	Indikator	Deskriptor	Skor per indikator	Skor per kriteria
5	Penerapan adat, seni budaya dan olah raga yang sesuai dengan filosofi adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah	1	Peningkatan eksistensi ninik mamak	0	
			Ada suku yang tidak memiliki ninik mamak		
			Semua suku sudah mempunyai ninik mamak	5	
		2	Peningkatan kapasitas ninik mamak	0	
			Tidak Ada program peningkatan kapasitas ninik mamak		
			Ada program namun tidak tersruktur dan tidak terkelola baik	3	
			Ada program terstruktur, terdokumentasi baik	5	
		3	Peningkatan kapasitas ampek jinih/imam khatik suku	0	
			Tidak Ada program peningkatan kapasitas Imam - Khatib (4 Jinih)		
			Ada program namun tidak terstruktur dan terkelola baik	3	
			Ada program terstruktur, terdokumentasi baik	5	
		4	Pengembangan program/kegiatan seni budaya yang sesuai adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah	1	
			Jika terdapat program pembinaan untuk satu jenis seni budaya berbasis nagari		
			Jika terdapat program pembinaan untuk 2-3 jenis seni budaya berbasis nagari	2	
			Jika terdapat program pembinaan untuk 4-5 jenis seni budaya berbasis nagari	3	
			Jika terdapat program pembinaan untuk lebih dari 5 jenis seni budaya berbasis nagari	4	
			Jika terdapat program pembinaan untuk lebih dari 5 jenis seni budaya berbasis nagari dan terdokumentasi baik	5	
		5	Pengembangan program/kegiatan olah raga masyarakat yang tidak bertentangan dengan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah	1	
			Jika terdapat Pelaksanaan kegiatan untuk satu jenis olah raga berbasis nagari		
			Jika terdapat Pelaksanaan kegiatan untuk 2-3 jenis olah raga berbasis nagari	2	
			Jika terdapat Pelaksanaan kegiatan untuk 4-5 jenis olah raga berbasis nagari	3	
			Jika terdapat Pelaksanaan kegiatan untuk lebih dari 5 jenis olah raga berbasis nagari	4	
			Jika terdapat Pelaksanaan kegiatan untuk lebih dari 5 jenis olah raga berbasis nagari dan terdokumentasi baik	5	

KABAN

SPESIALISASI

KELOMPOK

7

7

7

7

7

7

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Kriteria	Indikator	Deskriptor	Skor per indikator	Skor per kriteria
5	<b>Penurunan jumlah keluarga miskin</b> <i>Kriteria ini meliputi adanya unsur-unsur kepedulian: 1) Tersedia data keluarga miskin, 2) ada upaya sistematis untuk menyelesaikan masalah ini, 3) Upaya melibatkan banyak pihak secara aktif, 4) terjadi pengurangan jumlah keluarga miskin.</i>		Terdapat hanya 1 unsur kepedulian atau kurang		
			Terdapat 2 unsur kepedulian		
			Terdapat 3 unsur kepedulian		
			Terdapat 4 unsur kepedulian		
			Terdapat 4 unsur yang didukung dengan banyak bukti/dokumentasi yang baik		
6	<b>Pengembangan kegiatan atau forum yang meningkatkan persaudaraan dalam nagari</b> <i>Kriteria ini meliputi unsur-unsur: 1) Ada Gotong Royong berbasis nagari atau nagari Bersudara atau kampung, 2) Ada juga pertemuan masyarakat adat antar kampung, 3) Adanya kegiatan Seni Budaya yang sesuai ABS-SBK dalam rangka meningkatkan silaturahmi 4) Adanya kegiatan olahraga berbasis Nagari dalam rangka meningkatkan silaturahmi, 5) bentuk-bentuk forum lain</i>		Terdapat hanya 1 unsur		
			Terdapat 2 unsur		
			Terdapat 3 unsur		
			Terdapat 4 unsur		
			Terdapat 4 unsur yang didukung dengan banyak bukti/dokumentasi yang baik		
7	<b>Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat rantau</b> <i>Kriteranya meliputi unsur-unsur atau lain: 1) Keterlibatan dalam kegiatan keagamaan, donatur dll, 2) Kegiatan Sosial Budaya atau pembinaan pelestarian adat, 3) Kegiatan Pendidikan, 4) Terlaksananya Forum rutin pertemuan dengan perantau berbasis Nagari</i>		Terdapat hanya 1 unsur		
			Terdapat 2 unsur		
			Terdapat 3 unsur		
			Terdapat 4 unsur		
			Terdapat 4 unsur yang didukung dengan banyak bukti/dokumentasi yang baik		

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Kriteria	Indikator	Deskriptor	Skor per indikator	Skor per kriteria
6	Peningkatan peran serta lembaga dan organisasi masyarakat	1 Peningkatan peran serta KAN	Tidak ada struktur lembaga yang telah diformalkan	1	
			Ada lembaga tapi rapat rapat kurang dari 2 kali per tahun	2	
			Ada lembaga rapat rapat berjalan 3-5 kali per tahun terdokumentasi	3	
			Ada lembaga rapat rapat berjalan lebih dari 6 kali per tahun yang terdokumentasi	4	
			Ada lembaga rapat berjalan lebih dari 6 kali per tahun dan ada bukti tindaklanjut keputusan rapat	5	
		2 Peningkatan peran serta Majelis Ulama Indonesia Nagari	Tidak ada struktur lembaga yang telah diformalkan	1	
			Ada lembaga tapi rapat rapat kurang dari 2 kali per tahun	2	
			Ada lembaga rapat rapat berjalan 3-5 kali per tahun terdokumentasi	3	
			Ada lembaga rapat rapat berjalan lebih dari 6 kali per tahun yang terdokumentasi	4	
			Ada lembaga rapat berjalan lebih dari 6 kali per tahun dan ada bukti tindaklanjut keputusan rapat	5	
		3 Peningkatan peran serta Bundo Kanduang dan Organisasi Kewanitaan	Ada Organisasi Bundo Kanduang/ Organisasi Kewanitaan namun kurang aktif	1	
			Ada kegiatan organisasi Bundo kanduang/ Organisasi Kewanitaan yang meliputi setidaknya 2 jenis aktifitas terprogram	2	
			Ada kegiatan organisasi Bundo Kanduang/ Organisasi Kewanitaan yang meliputi setidaknya 3 jenis aktifitas terprogram	3	
			Ada kegiatan organisasi Bundo Kanduang/ Organisasi Kewanitaan yang meliputi setidaknya 4 jenis aktifitas dan dilaksanakan terprogram dan terdokumentasi	4	
			Ada kegiatan organisasi Bundo Kanduang/ Organisasi Kewanitaan yang meliputi setidaknya 5 jenis aktifitas dan dilaksanakan terprogram, terdokumentasi dan ada perencanaan berikutnya	5	

KAN

7

1

7

1

7

1



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Kriteria	Indikator	Deskriptor		Skor per indikator	Skor per kriteria
	4	Peningkatan peran serta Organisasi Kepemudaan	Ada Organisasi kepemudaan namun kurang aktif	1		
			Ada kegiatan organisasi kepemudaan yang meliputi setidaknya 2 jenis aktifitas terprogram	2		
			Ada kegiatan organisasi kepemudaan yang meliputi setidaknya 3 jenis aktifitas terprogram	3		
			Ada kegiatan organisasi kepemudaan yang meliputi setidaknya 4 jenis aktifitas dan dilaksanakan terprogram dan terdokumentasi	4		
			Ada kegiatan organisasi kepemudaan yang meliputi setidaknya 4 jenis aktifitas dan dilaksanakan terprogram, terdokumentasi dan ada ada perbaikan berkelanjutan	5		
7	Peningkatan kesalehan individu dan sosial	5	Ada Organisasi Keagamaan namun kurang aktif	1		
			Ada kegiatan Organisasi keagamaan yang meliputi setidaknya 2 jenis aktifitas terprogram	2		
			Ada kegiatan Organisasi Keagamaan yang meliputi setidaknya 3 jenis aktifitas terprogram	3		
			Ada kegiatan Organisasi Keagamaan yang meliputi setidaknya 4 jenis aktifitas dan dilaksanakan terprogram dan terdokumentasi	4		
			Ada kegiatan Organisasi Keagamaan yang meliputi setidaknya 4 jenis aktifitas dan dilaksanakan terprogram, terdokumentasi dan ada ada perbaikan berkelanjutan	5		
		1	Tidak ada data	1		
			Ada dokumentasi tapi tidak terjadi peningkatan	2		
			Ada dokumentasi dan terjadi peningkatan	3		
			Tidak ada data	1		
			Ada dokumentasi tapi tidak terjadi peningkatan	3		
			Ada dokumentasi dan terjadi peningkatan	5		

KABUPATEN

KECAMATAN

KELOMPOK

NO. SURAT

2

7

12

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Kriteria	Indikator	Deskriptor	Skor per indikator	Skor per kriteria
	3	Peningkatan jumlah Zakat Infak dan Sedekah	Tidak ada data	1	
			Ada dokumentasi tapi tidak terjadi peningkatan	3	
			Ada dokumentasi dan terjadi peningkatan	5	
			Banyak Pelanggaran Pakaiain muslim sesuai Perda No 6 th 2005 pasal 4 pada acara berbasiskan nagari	0	
			Sedikit Pelanggaran Pakaiain muslim sesuai Perda No 6 th 2005 pasal 4 pada acara berbasiskan nagari	3	
	5	Pembangunan simbol-simbol <small>Kriteria ini meliputi adanya lambang, Papan/ spanduk husna b. Stiker/ papan salam c. Papan/ spanduk himbauan dengan menyertakan dalil d. Papan/spanduk pengumuman (contoh: "Anda berada di kawasan nagari madani") e. Papan/ Spanduk/ Stiker peringatan hari besar islam</small>	Tidak Ada Pelanggaran Pakaiain muslim sesuai Perda No 6 th 2005 pasal 4 pada acara berbasiskan nagari	5	
			Terdapat hanya 1 unsur	1	
			Terdapat 2 unsur	2	
			Terdapat 3 unsur	3	
			Terdapat 4 unsur	4	
	6	Pengembangan lingkungan bersih <small>atas partisipasi warga</small> <small>Kriteria ini meliputi adanya unsur : 1) Terdapatnya fasilitas pembuangan sampah yang memenuhi syarat, 2) Ada upaya sistematis berbasis nagari, 3) Ada inisiatif 3 R (Reuse - reduce - Recycle sampah), 4) Adanya alat peraga, sosialisasi, himbauan di tempat-tempat umum</small>	Terdapat lebih dari 4 unsur	5	
			Terdapat hanya 1 unsur atau kurang	1	
			Terdapat 2 unsur	2	
			Terdapat 3 unsur	3	
			Terdapat 4 unsur	4	
			Terdapat 4 unsur yang didukung dengan banyak bukti/ dokumentasi yang baik	5	

BUPATI AGAM,

INDRA CATRI



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Syukriadi sebagai penulis dilahirkan di Lawang, Kab.Agam, Sumatera Barat pada tanggal 28 September 1998. Penulis merupakan anak ke 5 dari 5 bersaudara, dari pasangan Ayahanda Masrizal dan Ibunda Nurbaiti, yang bertempat tinggal di Lawang, Kab.Agam, Sumatera Barat. Adapun perjalanan penulis di jenjang menuntut ilmu pengetahuan, penulis telah mengikuti pendidikan formal

sebagai berikut: pada tahun 2005 penulis memasuki SDN 08 Puncak Lawang dan menyelesaikan pendidikan selama 6 tahun. Pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan di MTsN Matur dan menyelesaikan pendidikan selama 3 tahun. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di MAN 1 Model Bukittinggi dengan jurusan Ilmu Pendidikan Keagamaan (IPK) menyelesaikan pendidikan selama 3 tahun. Kemudian pada tahun 2017 penulis kembali melanjutkan pendidikannya ke salah satu Perguruan Tinggi yang ada di Provinsi Riau yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis lulus melalui jalur Mandiri di Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum dan menyelesaikan pendidikan selama 4 tahun 3 bulan.

Pada tahun 2021 penulis melakukan penelitian di Nagari Lawang Kec.Matur, Kab. Agam Sumatera Barat dengan judul **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO. 74 TAHUN 2016 TENTANG NAGARI MADANI DI NAGARI LAWANG KEC. MATUR KAB. AGAM MENURUT FIQH SIYASAH** dalam bimbingan bapak Arisman M.Sy. Alhamdulillah, dengan limpahan Rahmat dari Allah SWT, pada tanggal 11 Oktober 2021 penulis melaksanakan ujian Munaqasyah atau ujian sarjana (S1) Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan dinyatakan "lulus dengan predikat sangat memuaskan" dan berhak memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.